



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 116 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 116 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 102 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 116 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, perlu disesuaikan dan diubah untuk ketiga kali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 116 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 114);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 116 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 102 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 116 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 116 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 116 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 102 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 116 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 103), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 20 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

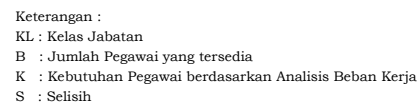
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBA, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

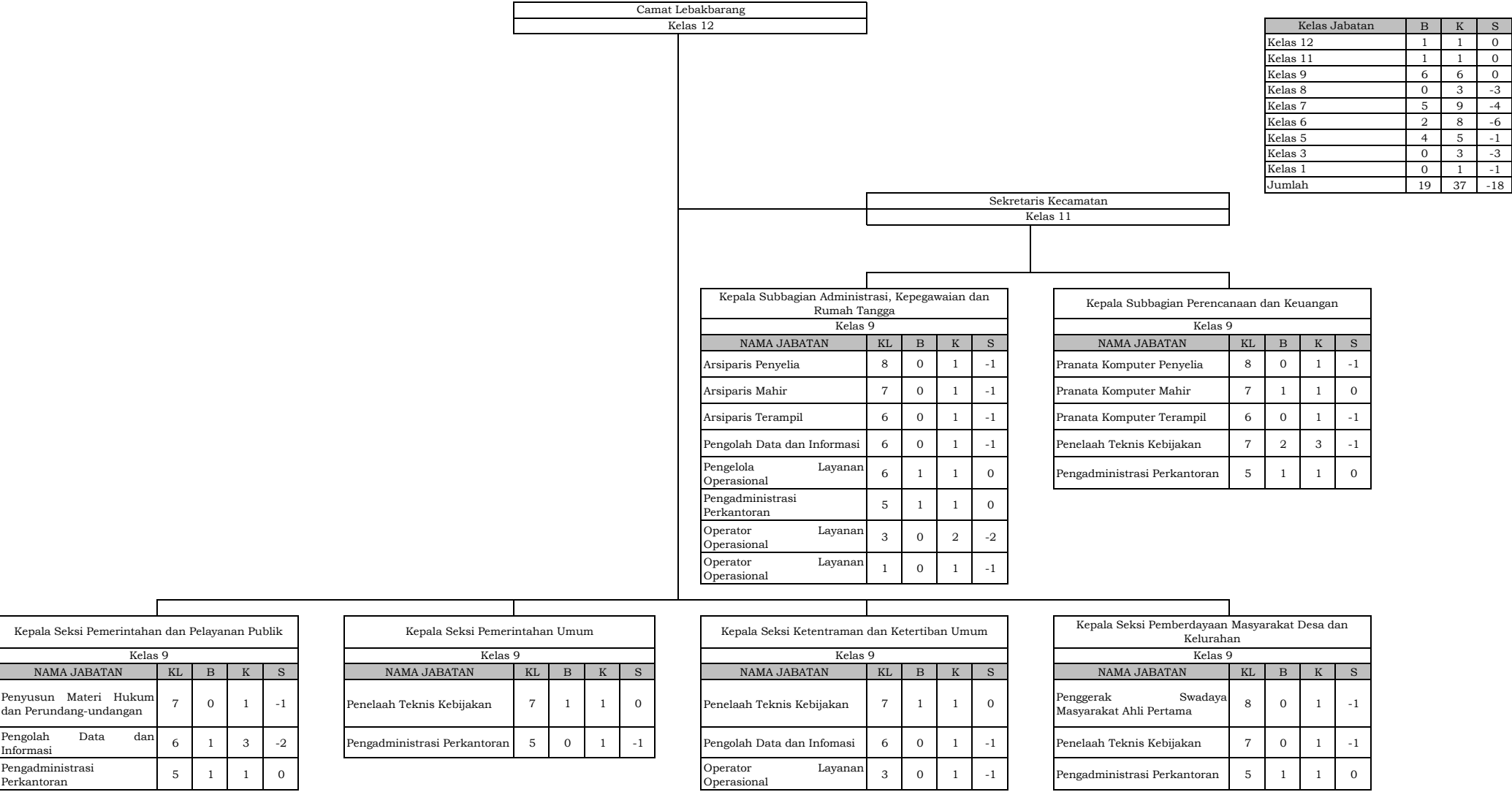
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 116 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PEKALONGAN

I. KECAMATAN PETUNGKRIYONO



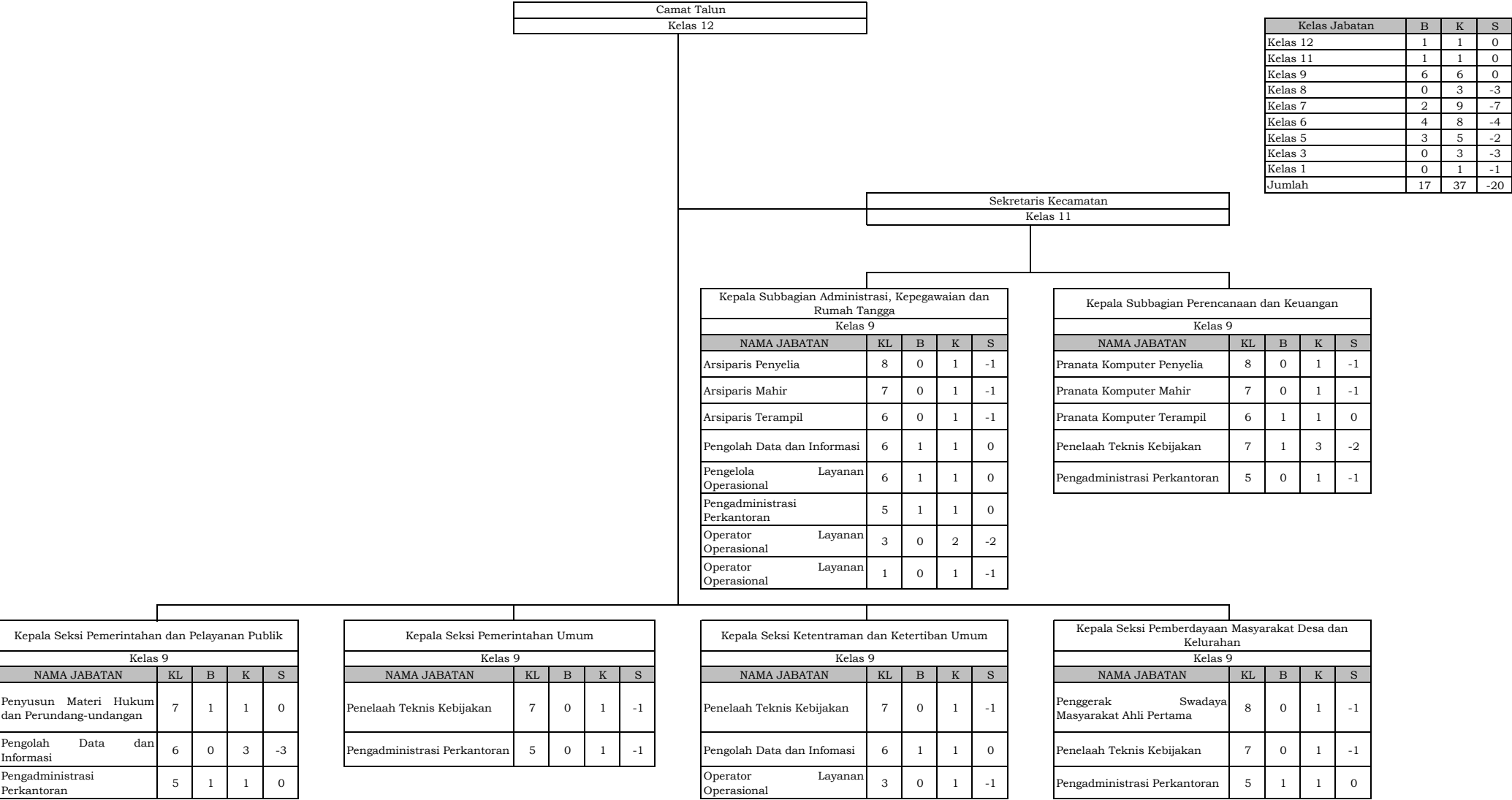
PETA JABATAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

II. KECAMATAN LEBAKBARANG



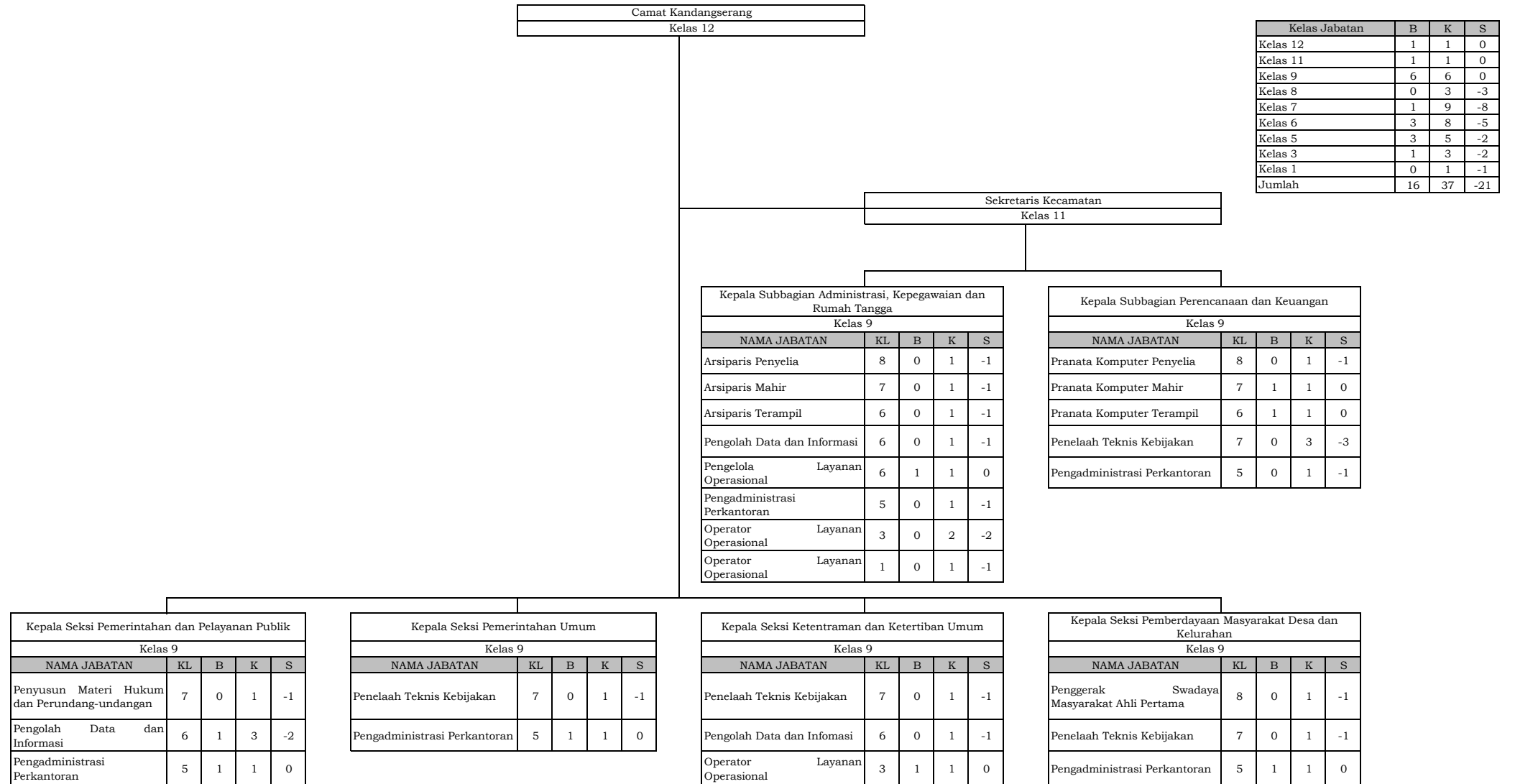
PETA JABATAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

III. KECAMATAN TALUN



PETA JABATAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

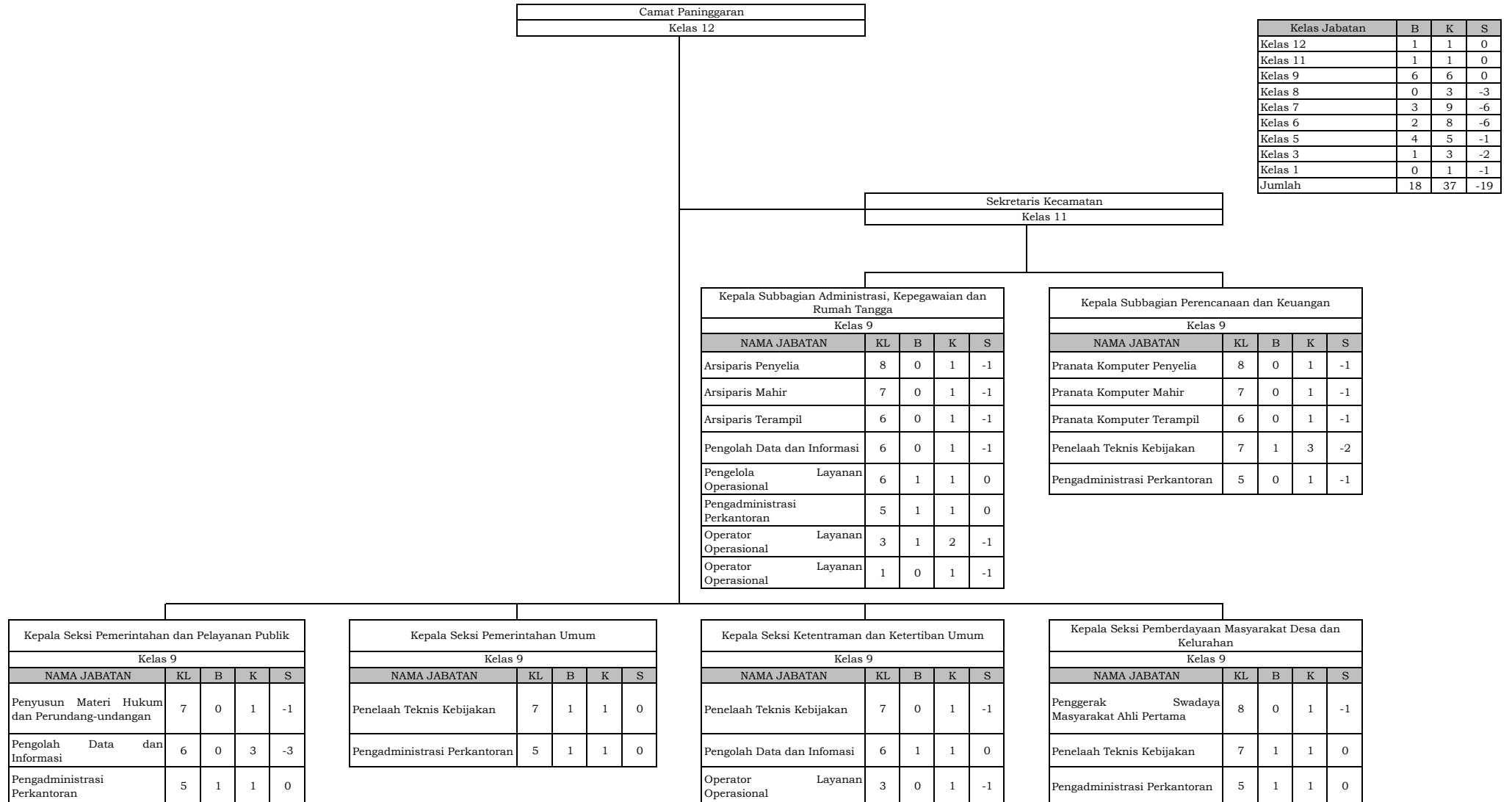
IV. KECAMATAN KANDANGSERANG



Keterangan :
 KL : Kelas Jabatan
 B : Jumlah Pegawai yang tersedia
 K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja
 S : Selisih

PETA JABATAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

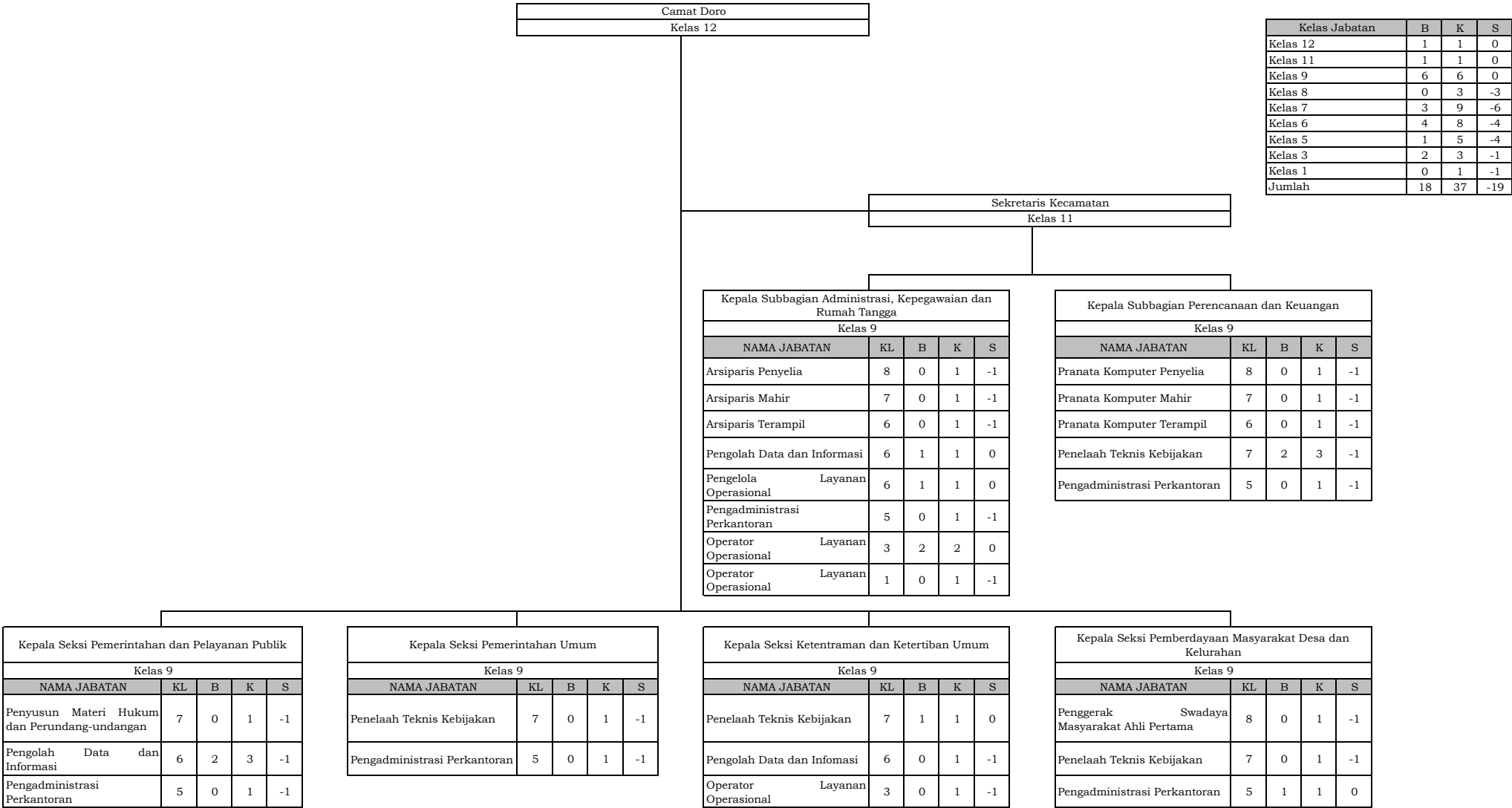
V. KECAMATAN PANINGGARAN



Keterangan :
 KL : Kelas Jabatan
 B : Jumlah Pegawai yang tersedia
 K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja
 S : Selisih

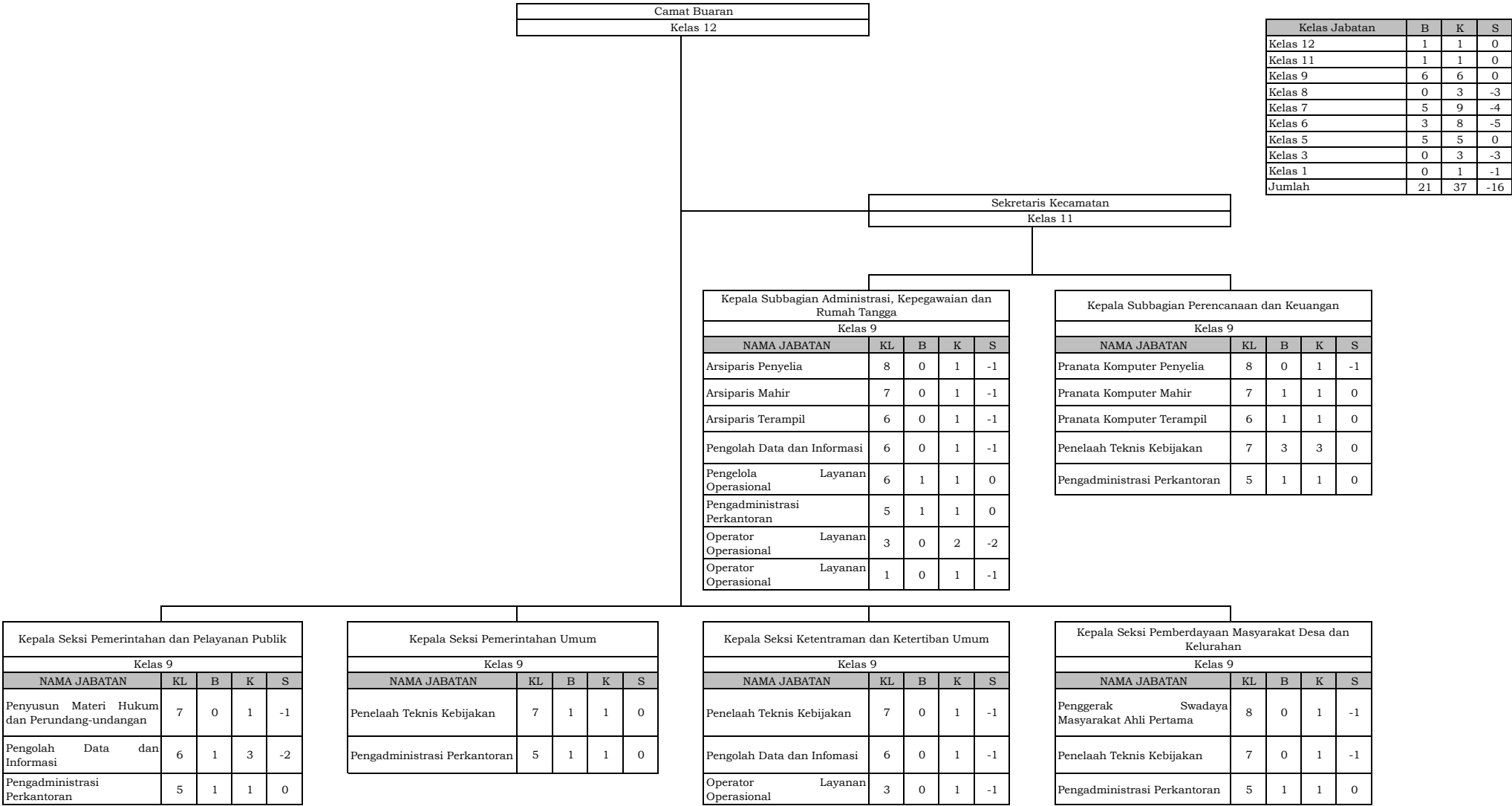
PETA JABATAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

VI. KECAMATAN DORO

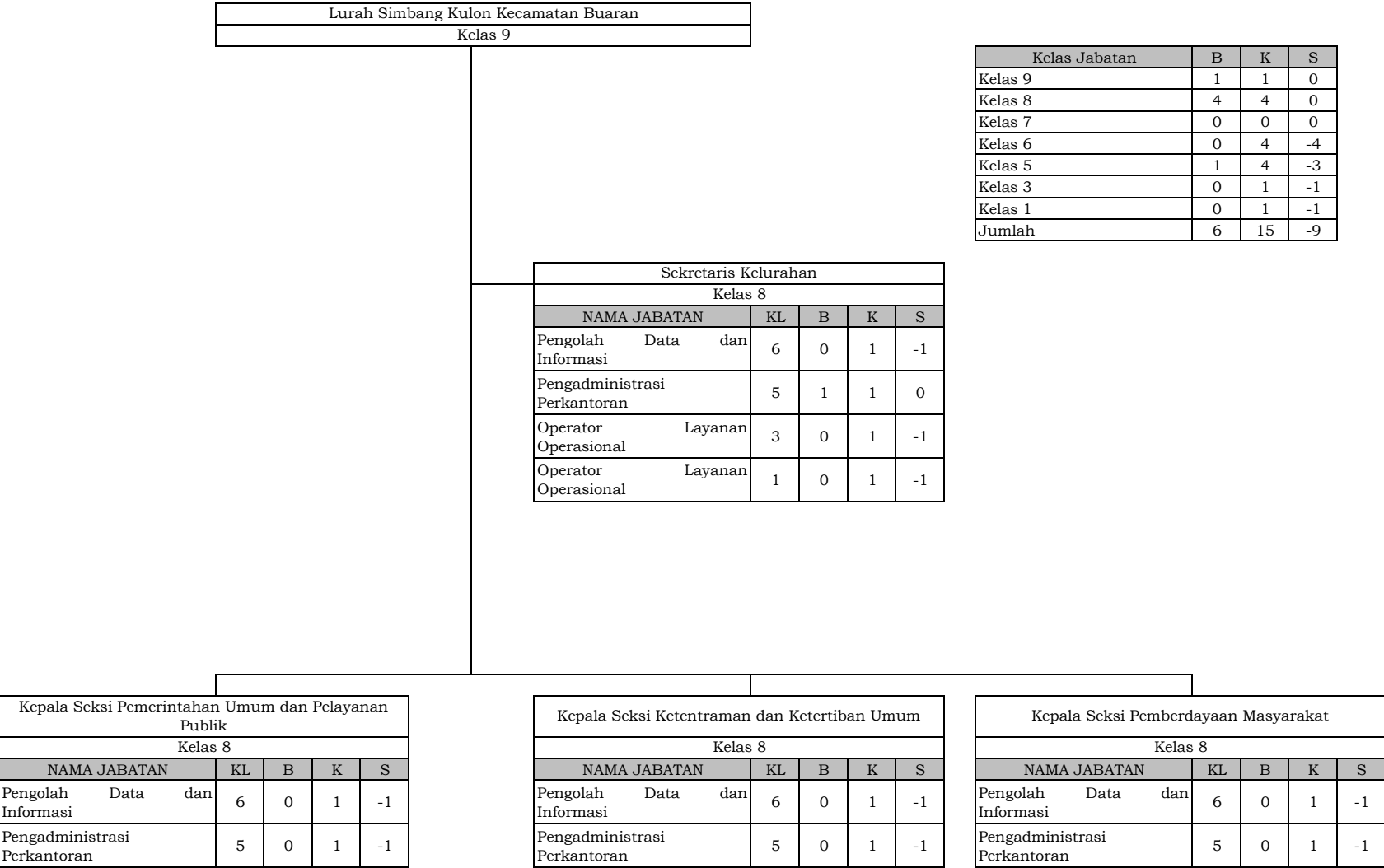


PETA JABATAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

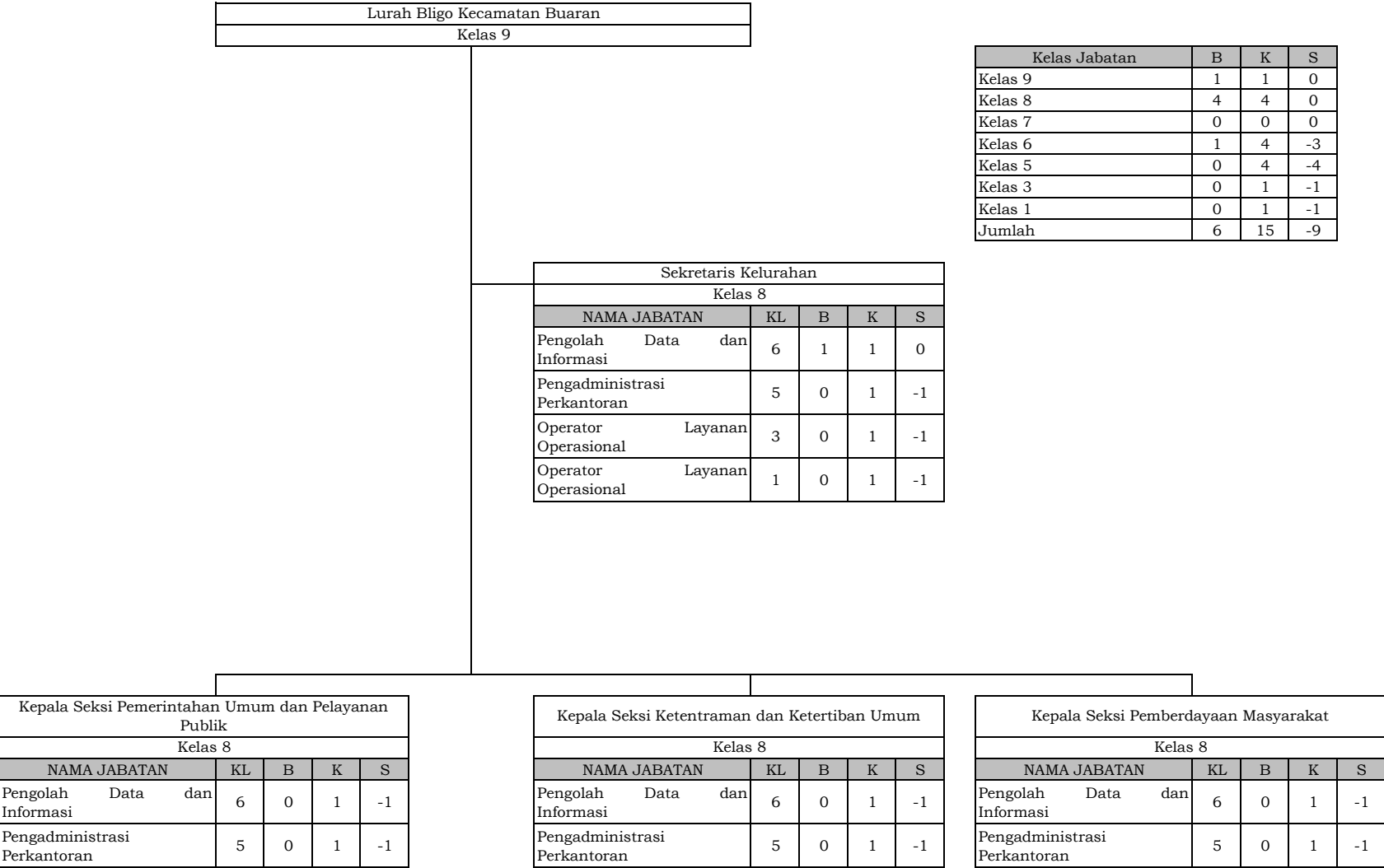
VII. KECAMATAN BUARAN



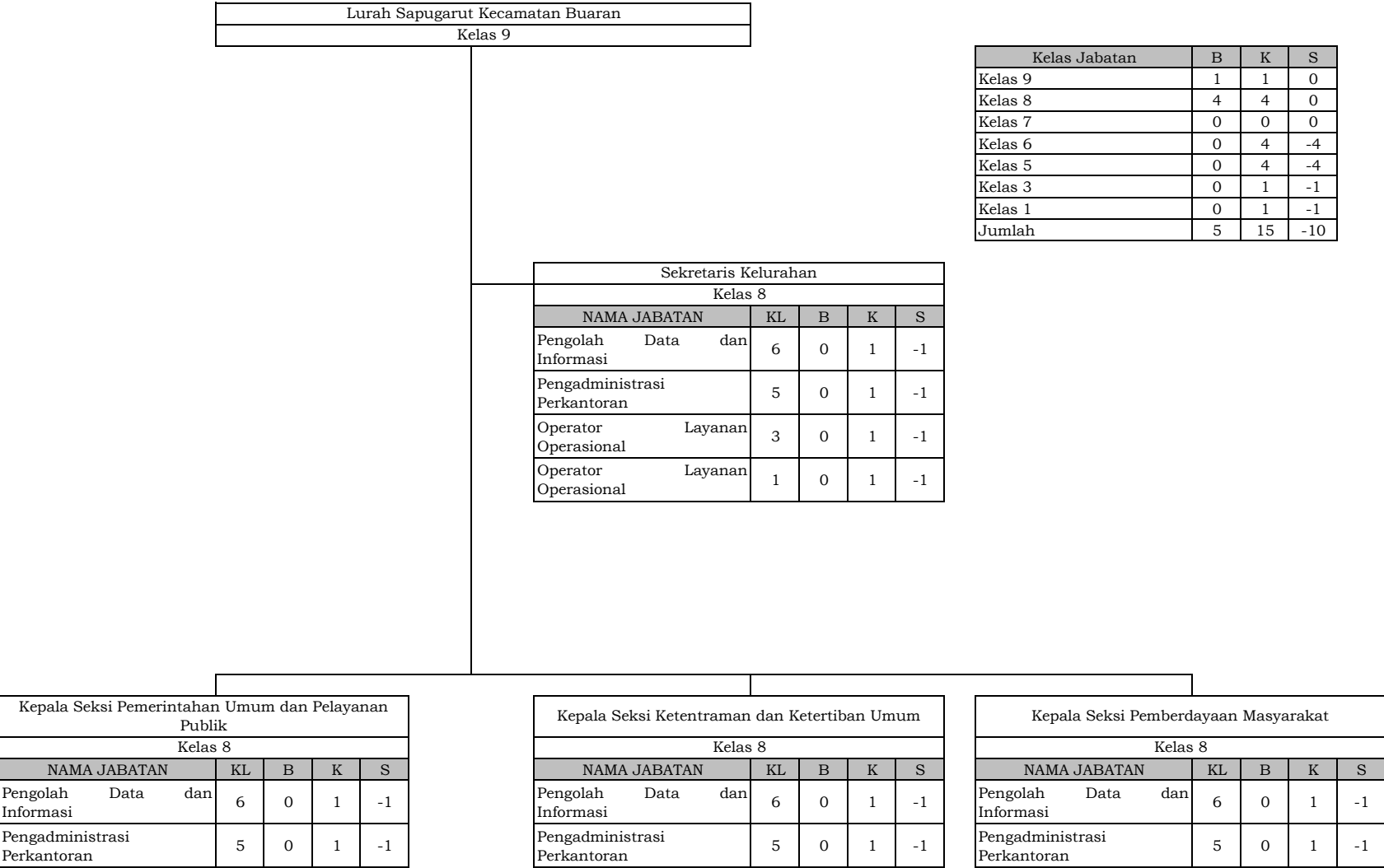
VII.A KELURAHAN SIMBANG KULON KECAMATAN BUARAN



VII.B KELURAHAN BLIGO KECAMATAN BUARAN

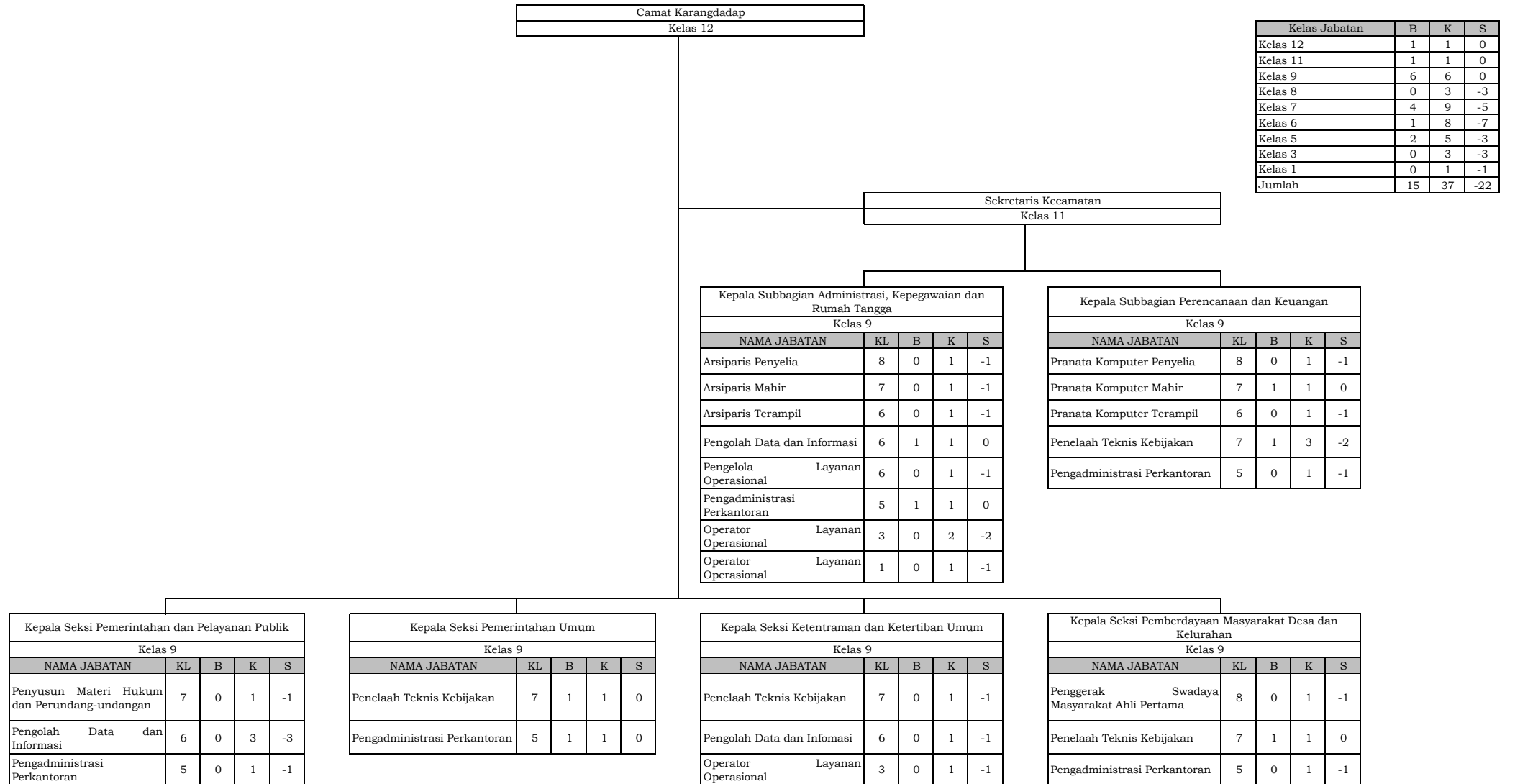


VII.C KELURAHAN SAPUGARUT KECAMATAN BUARAN



PETA JABATAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

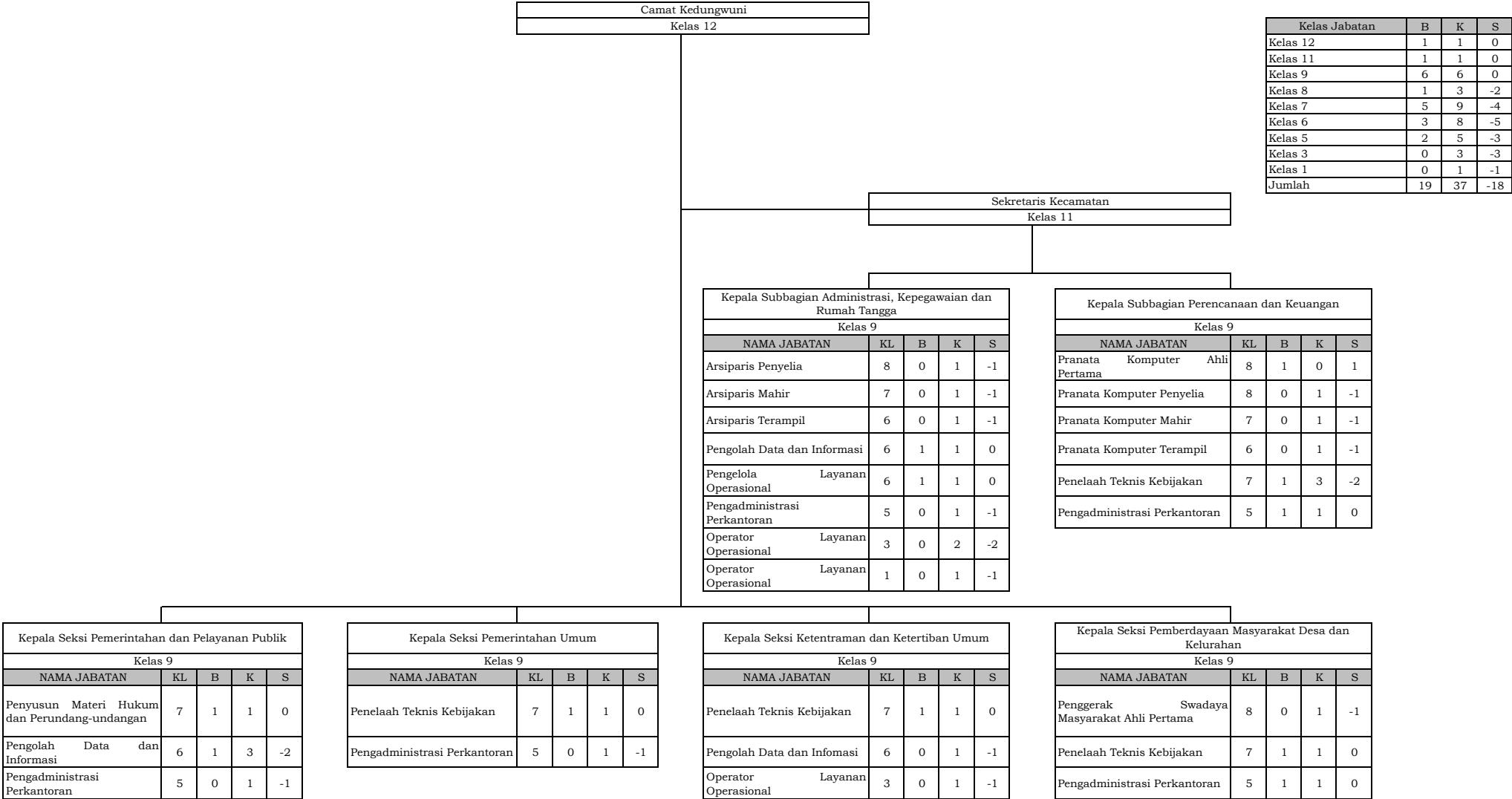
VIII. KECAMATAN KARANGDADAP



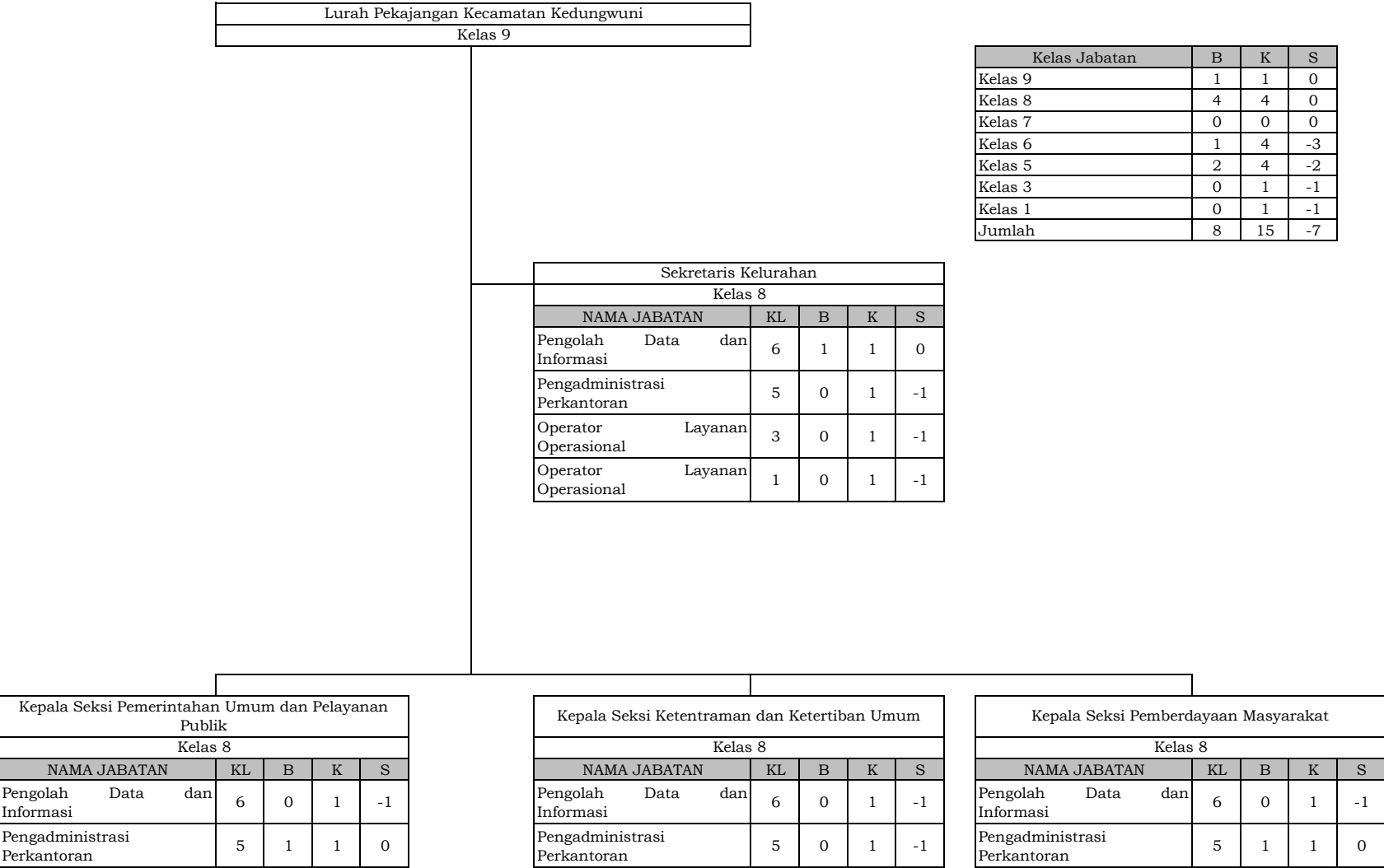
Keterangan :
 KL : Kelas Jabatan
 B : Jumlah Pegawai yang tersedia
 K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja
 S : Selisih

PETA JABATAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

IX. KECAMATAN KEDUNGWUNI



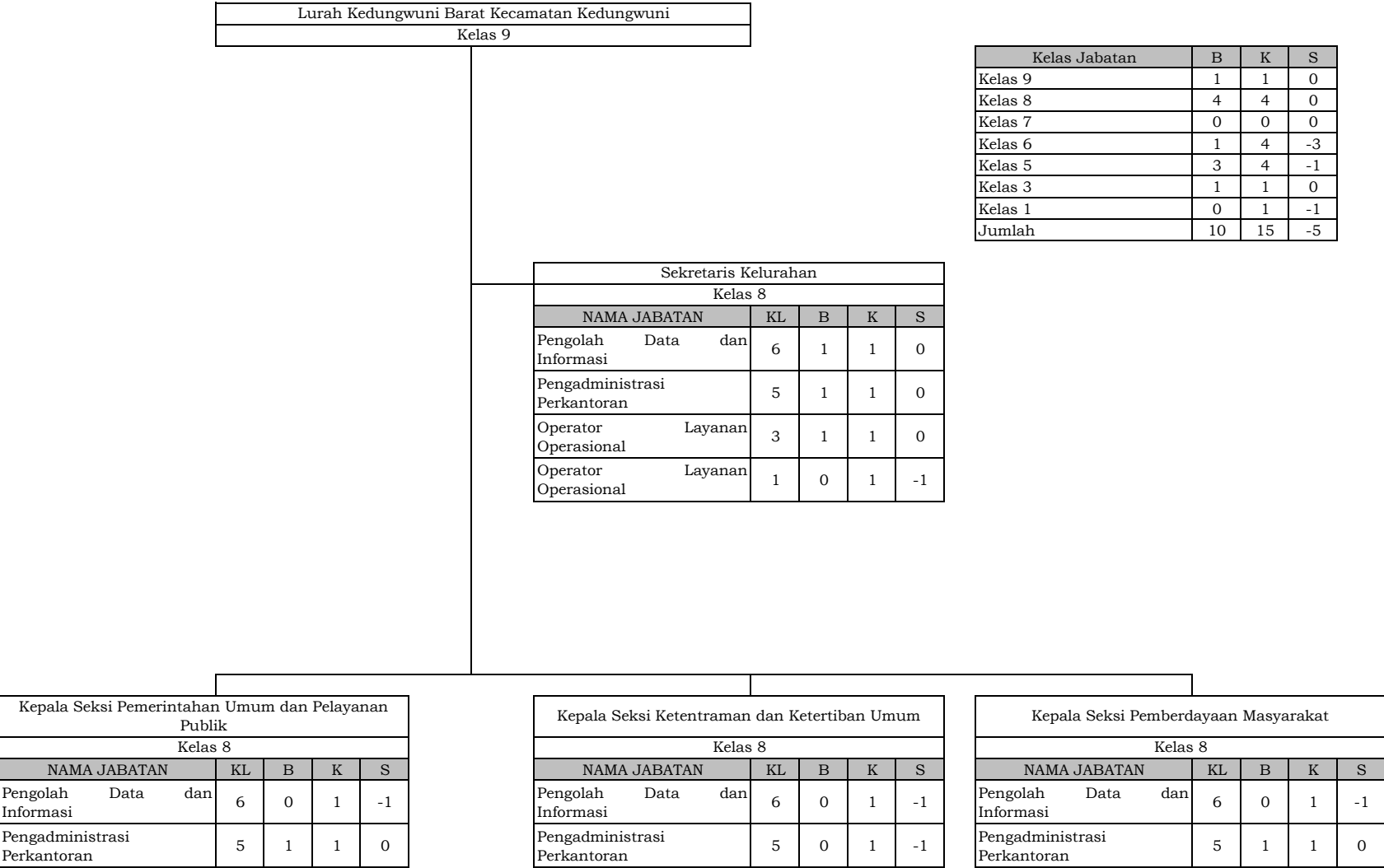
IX.A KELURAHAN PEKAJANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI



Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 9	1	1	0
Kelas 8	4	4	0
Kelas 7	0	0	0
Kelas 6	1	4	-3
Kelas 5	2	4	-2
Kelas 3	0	1	-1
Kelas 1	0	1	-1
Jumlah	8	15	-7

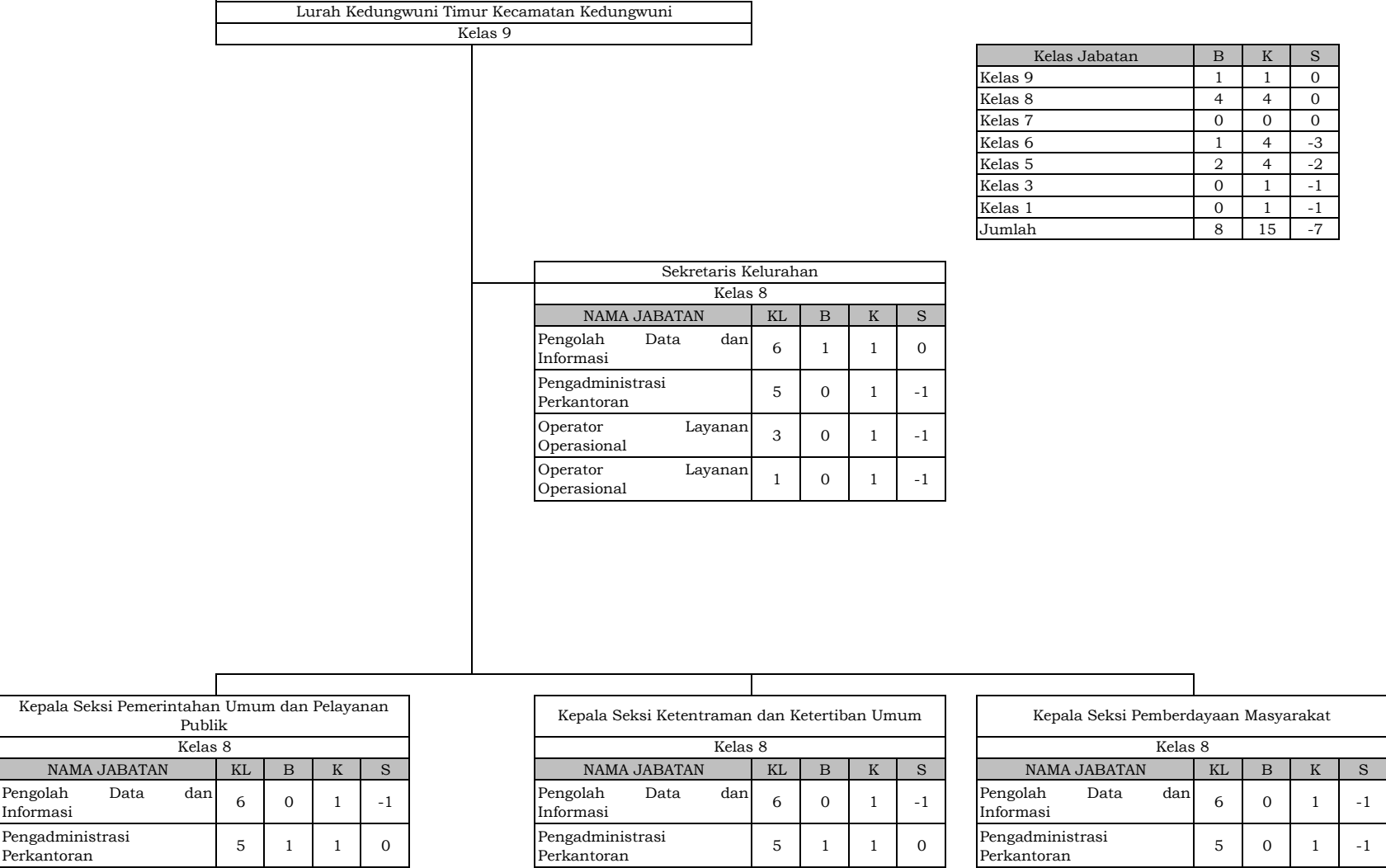
Keterangan :
KL : Kelas Jabatan
B : Jumlah Pegawai yang tersedia
K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja
S : Selisih

IX.B KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT KECAMATAN KEDUNGWUNI



Keterangan :
KL : Kelas Jabatan
B : Jumlah Pegawai yang tersedia
K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja
S : Selisih

IX.C KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI

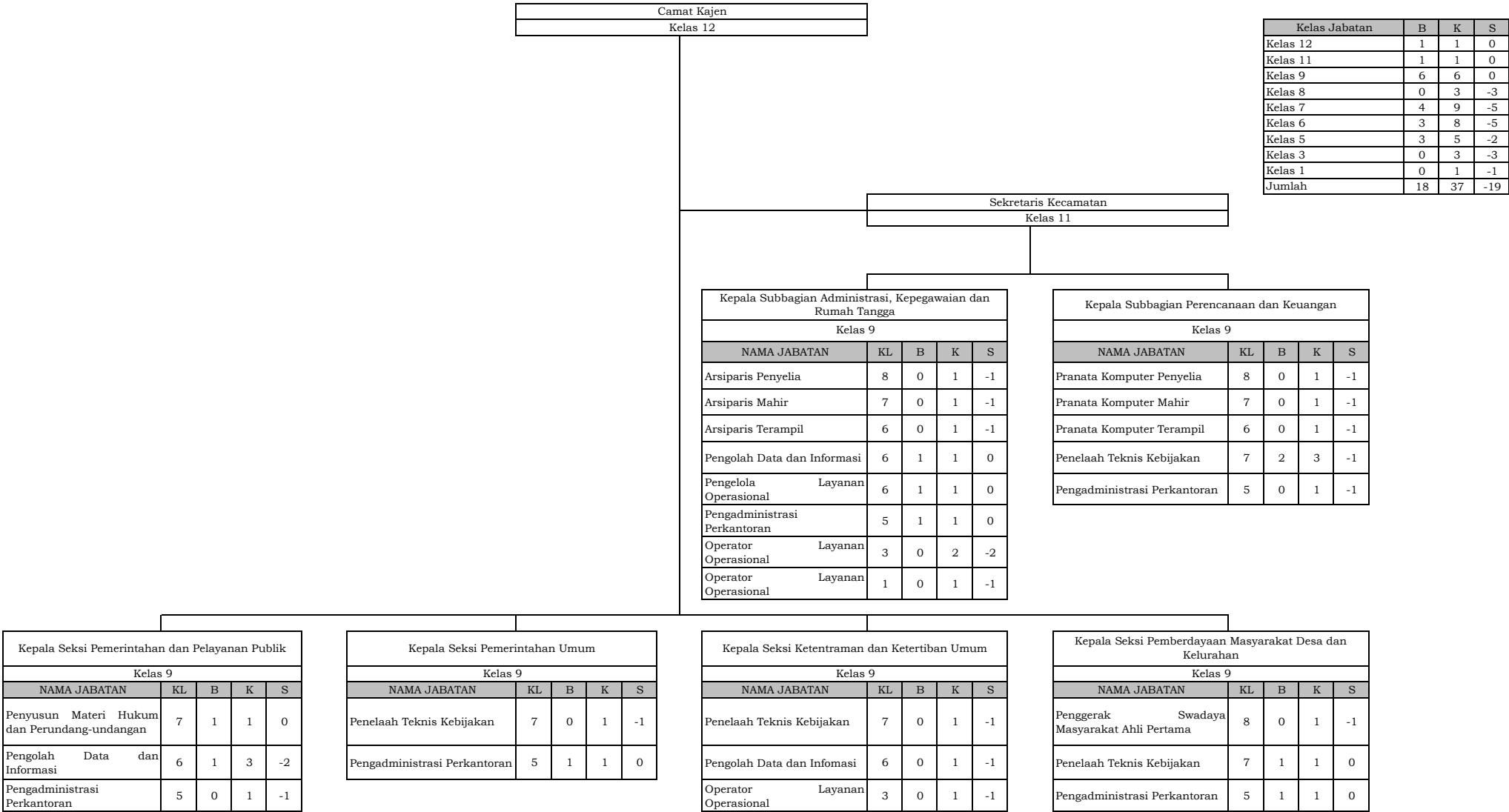


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 9	1	1	0
Kelas 8	4	4	0
Kelas 7	0	0	0
Kelas 6	1	4	-3
Kelas 5	2	4	-2
Kelas 3	0	1	-1
Kelas 1	0	1	-1
Jumlah	8	15	-7

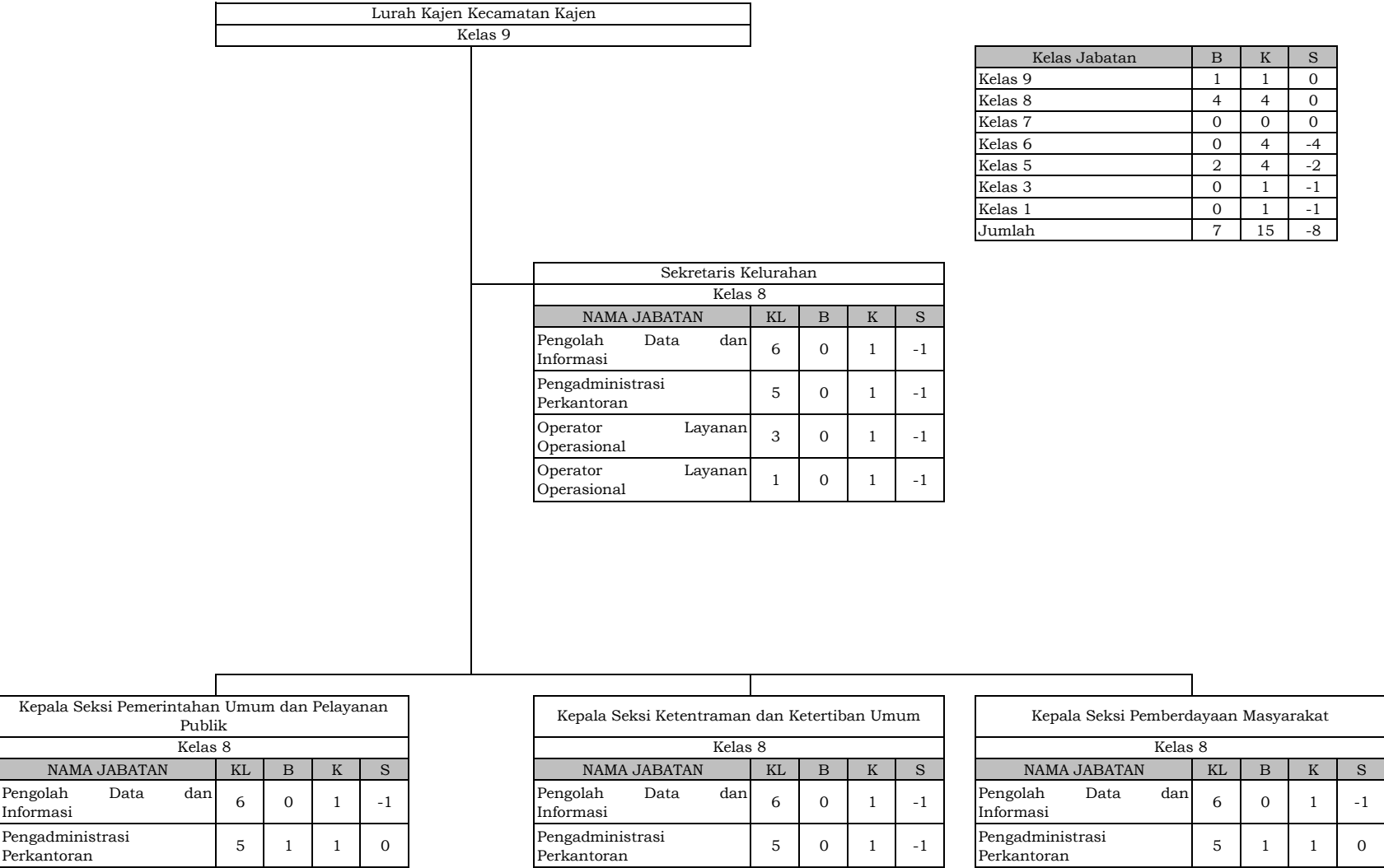
Keterangan :
KL : Kelas Jabatan
B : Jumlah Pegawai yang tersedia
K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja
S : Selisih

PETA JABATAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

X. KECAMATAN KAJEN

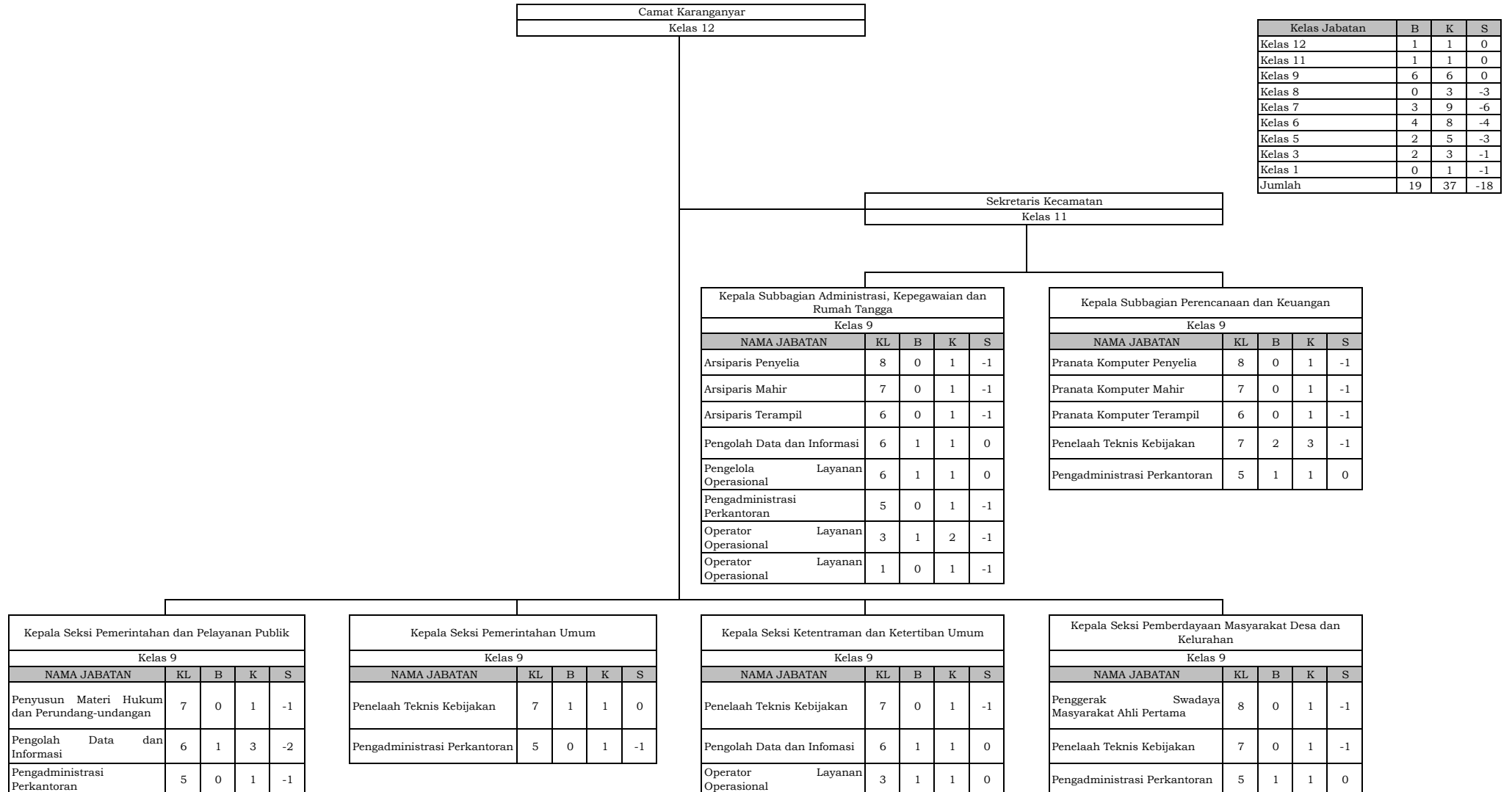


X.A KELURAHAN KAJEN KECAMATAN KAJEN



PETA JABATAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

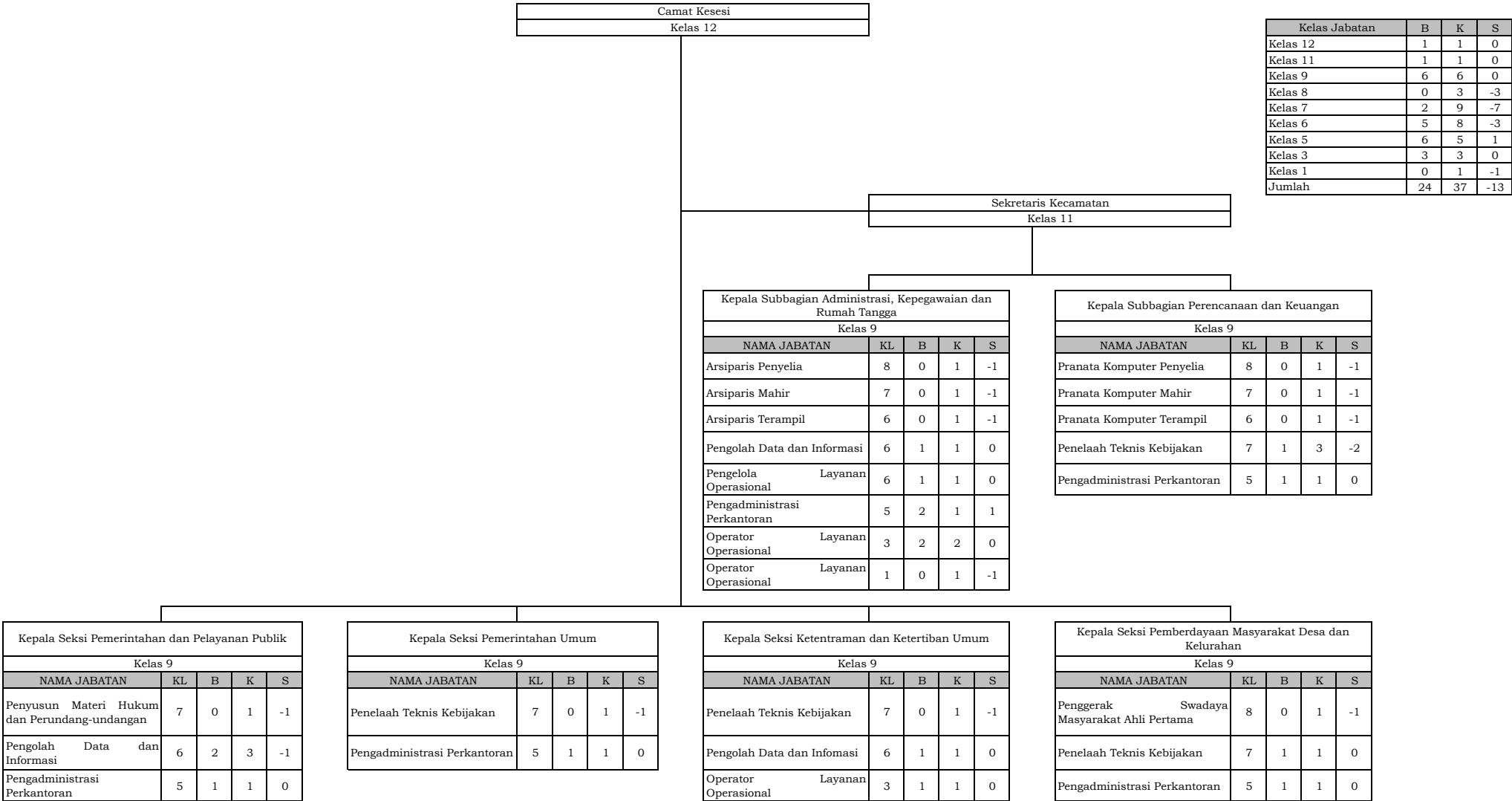
XI. KECAMATAN KARANGANYAR



Keterangan :
 KL : Kelas Jabatan
 B : Jumlah Pegawai yang tersedia
 K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja
 S : Selisih

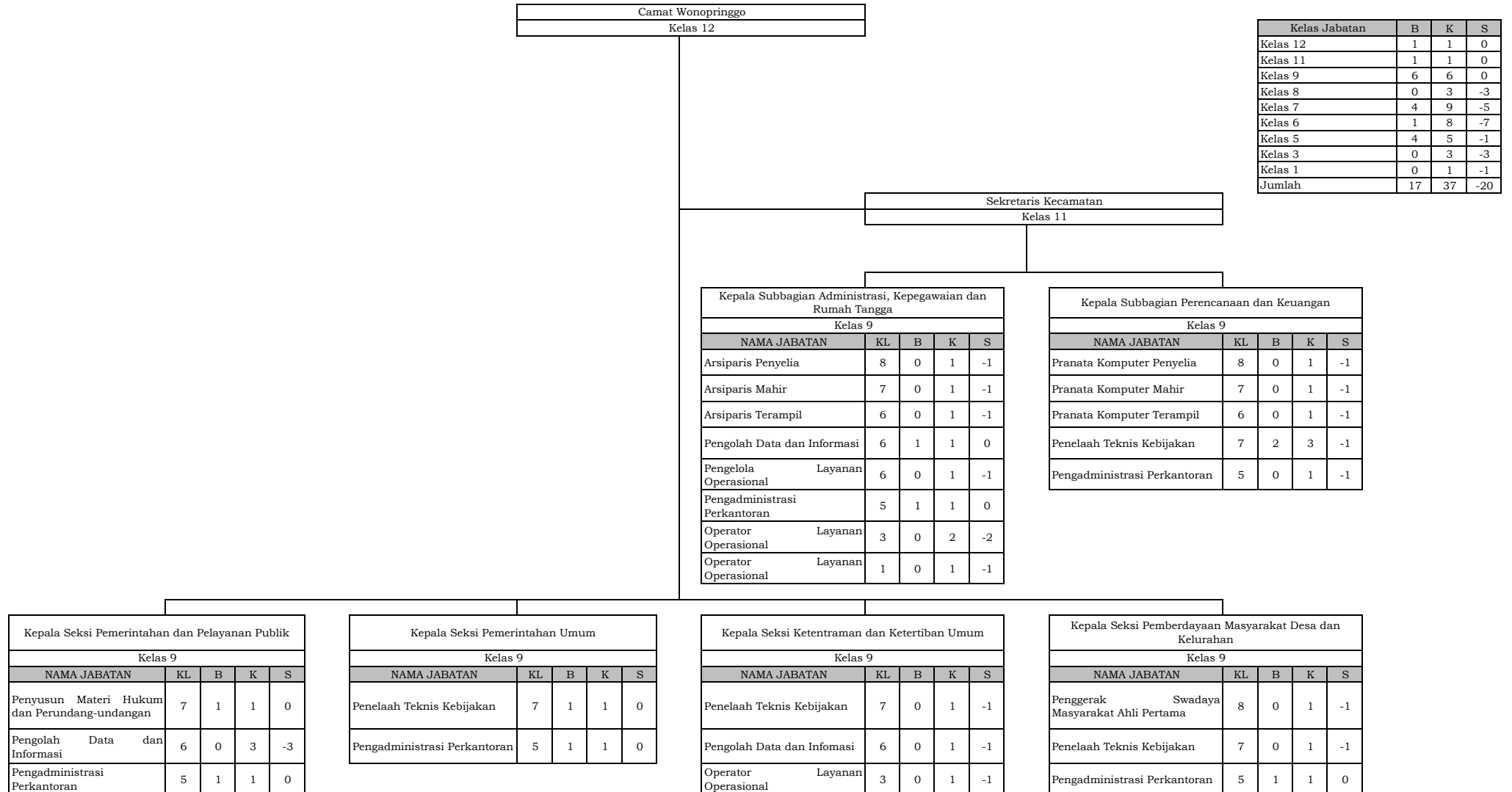
PETA JABATAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

XII. KECAMATAN KESESI



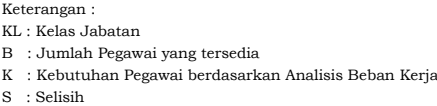
PETA JABATAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

XIII. KECAMATAN WONOPRINGGO



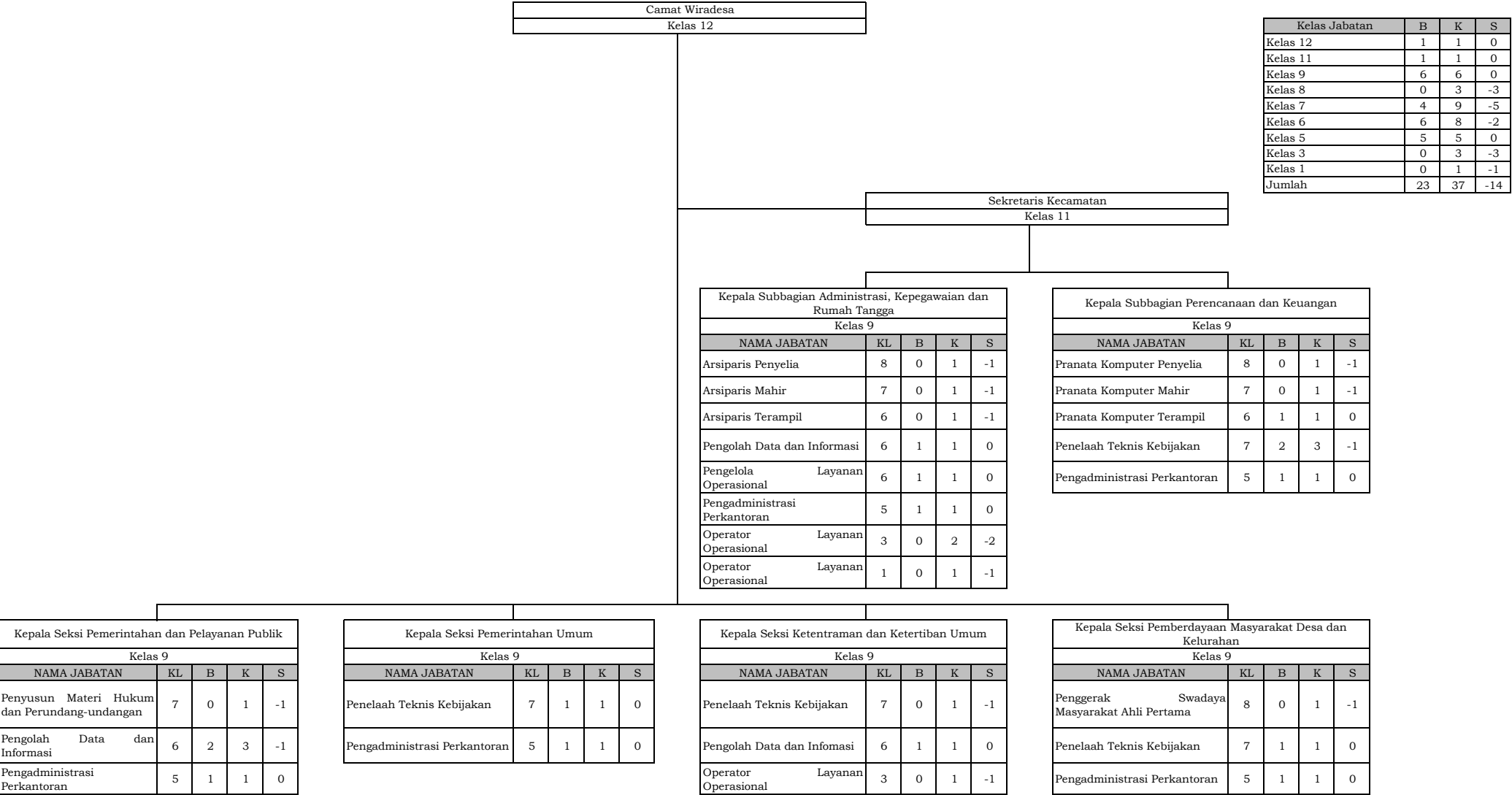
Keterangan :
 KL : Kelas Jabatan
 B : Jumlah Pegawai yang tersedia
 K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja
 S : Selisih

XIV. KECAMATAN BOJONG



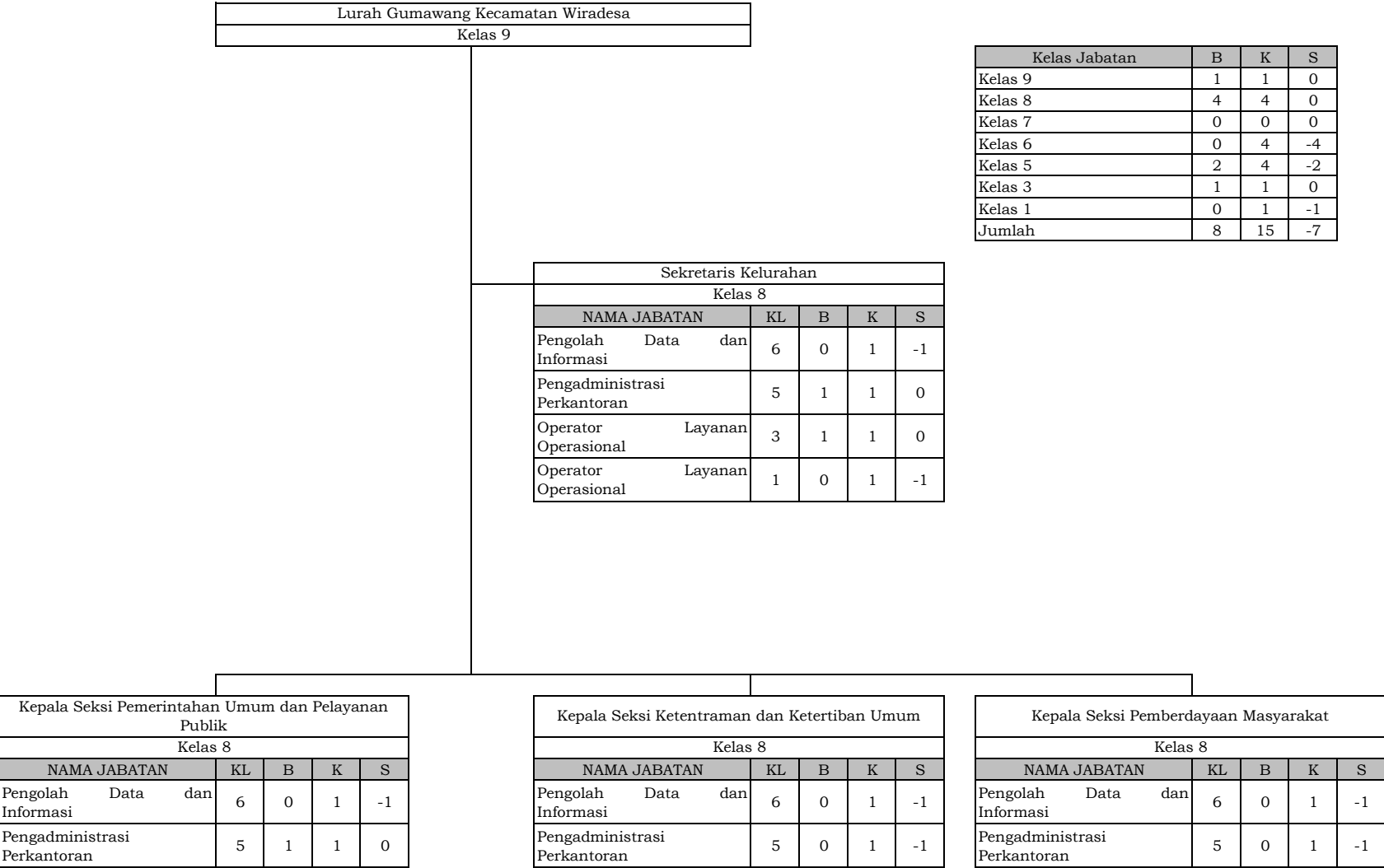
PETA JABATAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

XV. KECAMATAN WIRADESA

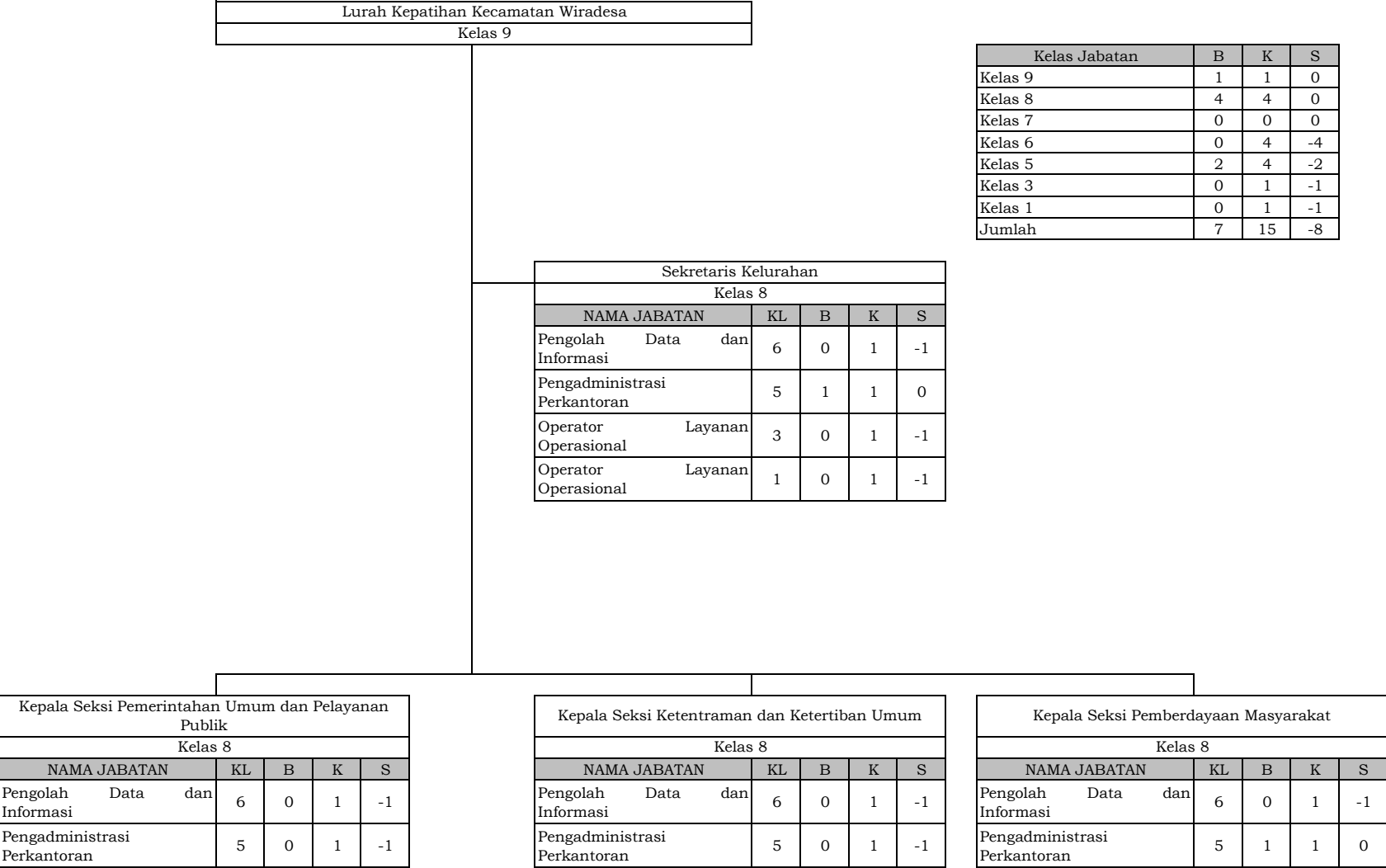


Keterangan :
KL : Kelas Jabatan
B : Jumlah Pegawai yang tersedia
K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja
S : Selisih

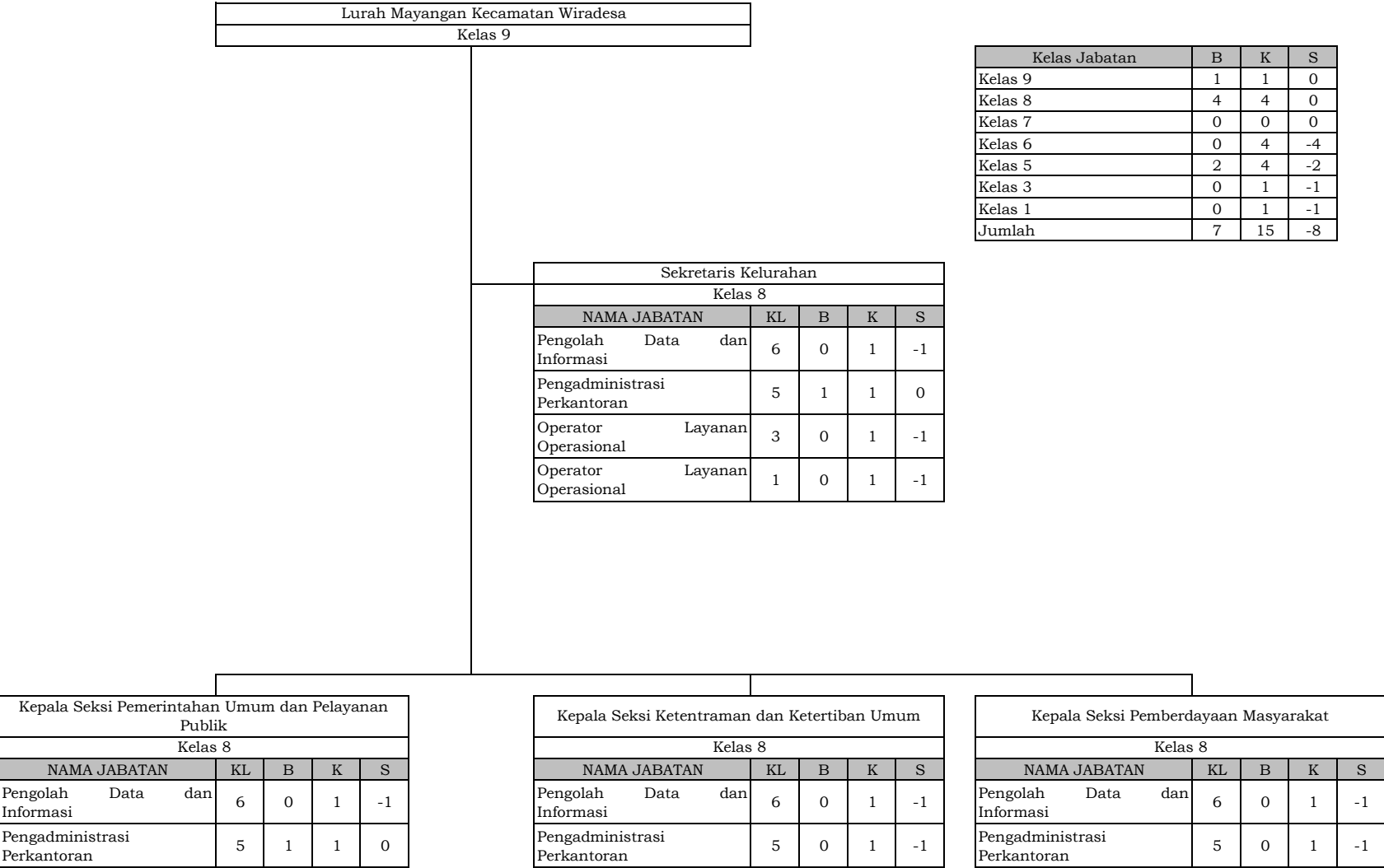
XV.A KELURAHAN GUMAWANG KECAMATAN WIRADESA



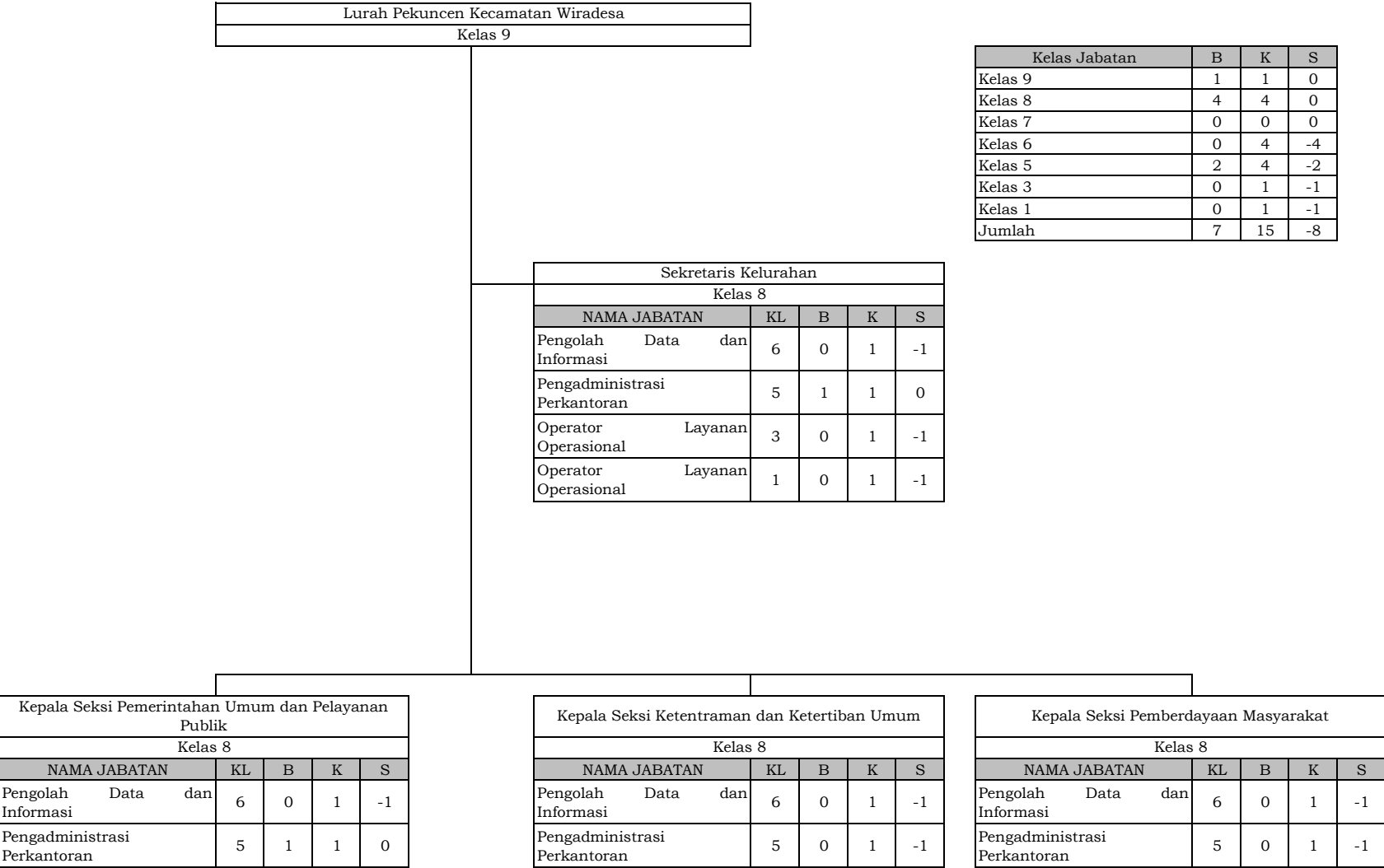
XV.B KELURAHAN KEPATIHAN KECAMATAN WIRADESA



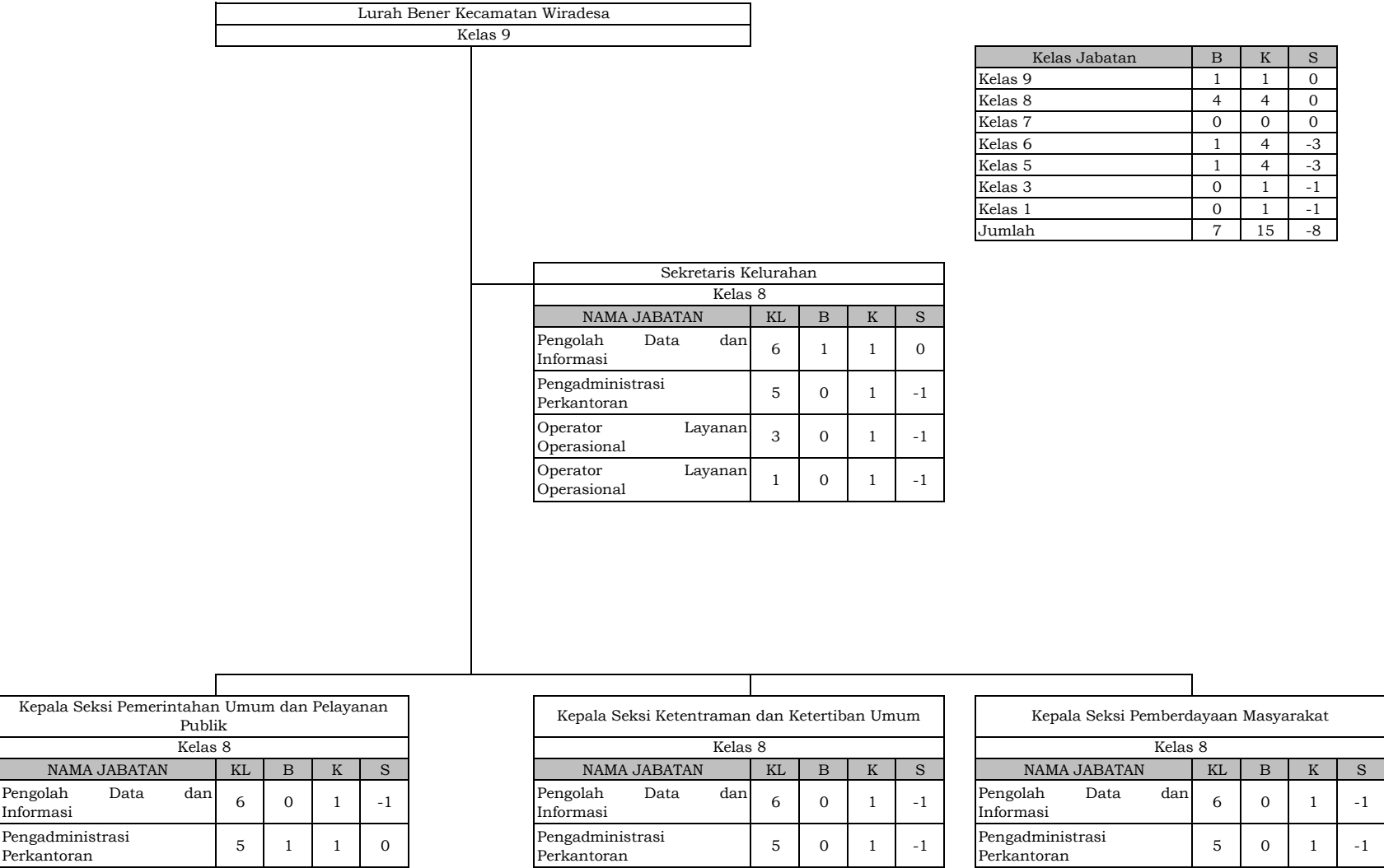
XV.C KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN WIRADESA



XV.D KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN WIRADESA



XV.E KELURAHAN BENER KECAMATAN WIRADESA

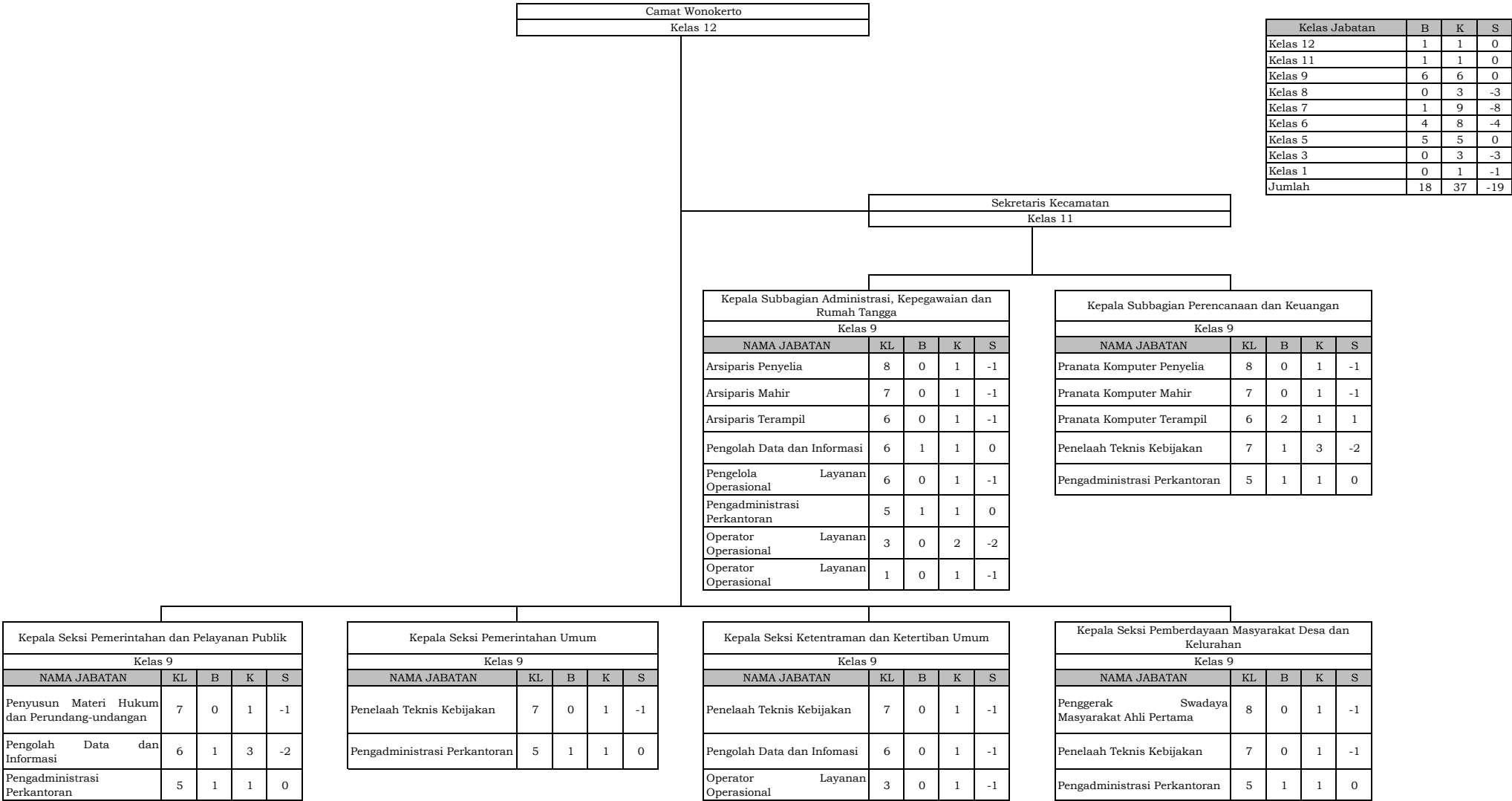


Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 9	1	1	0
Kelas 8	4	4	0
Kelas 7	0	0	0
Kelas 6	1	4	-3
Kelas 5	1	4	-3
Kelas 3	0	1	-1
Kelas 1	0	1	-1
Jumlah	7	15	-8

Keterangan :
KL : Kelas Jabatan
B : Jumlah Pegawai yang tersedia
K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja
S : Selisih

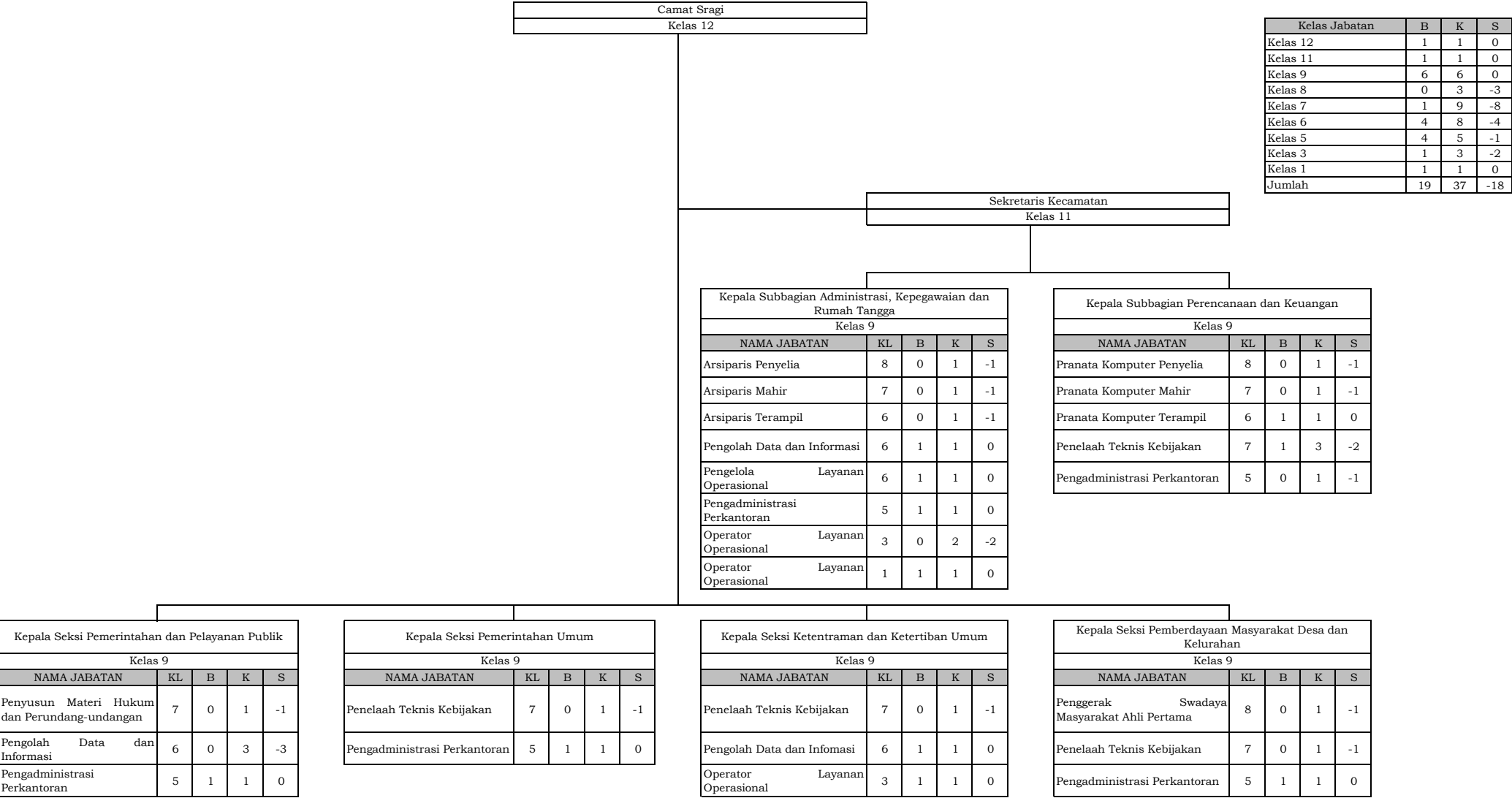
PETA JABATAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

XVI. KECAMATAN WONOKERTO

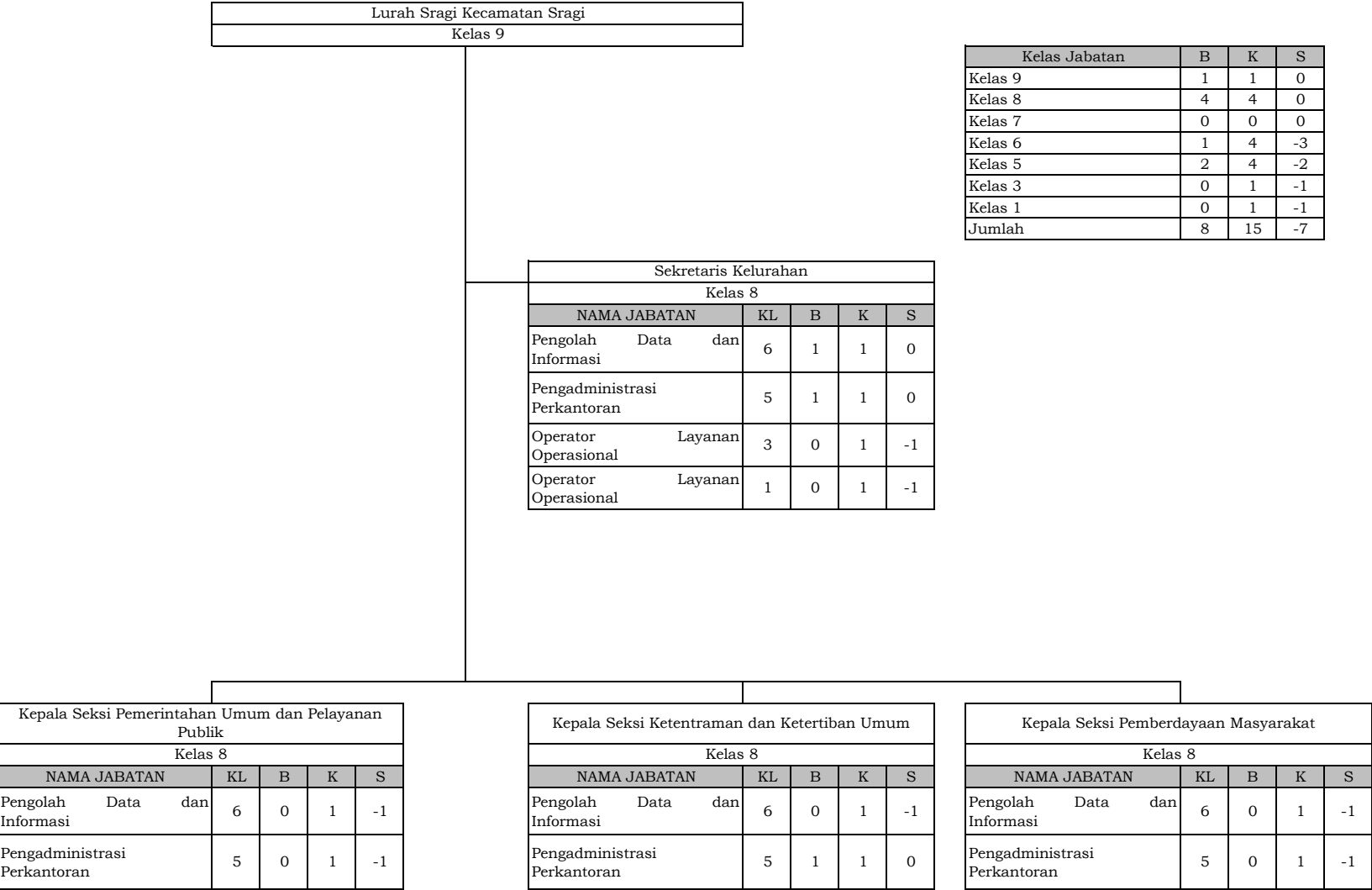


PETA JABATAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

XVII. KECAMATAN SRAGI



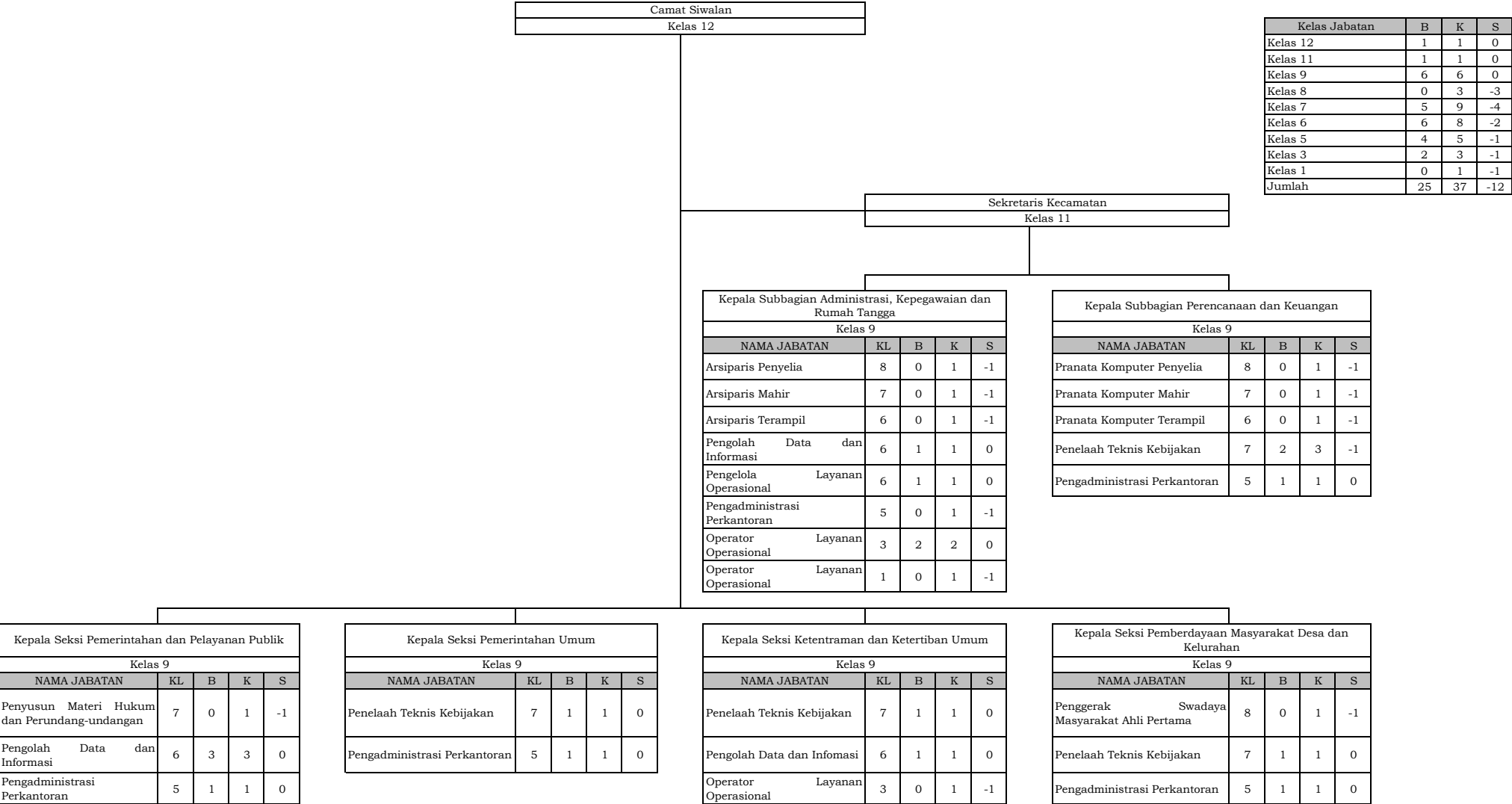
XVII.A KELURAHAN SRAGI KECAMATAN SRAGI



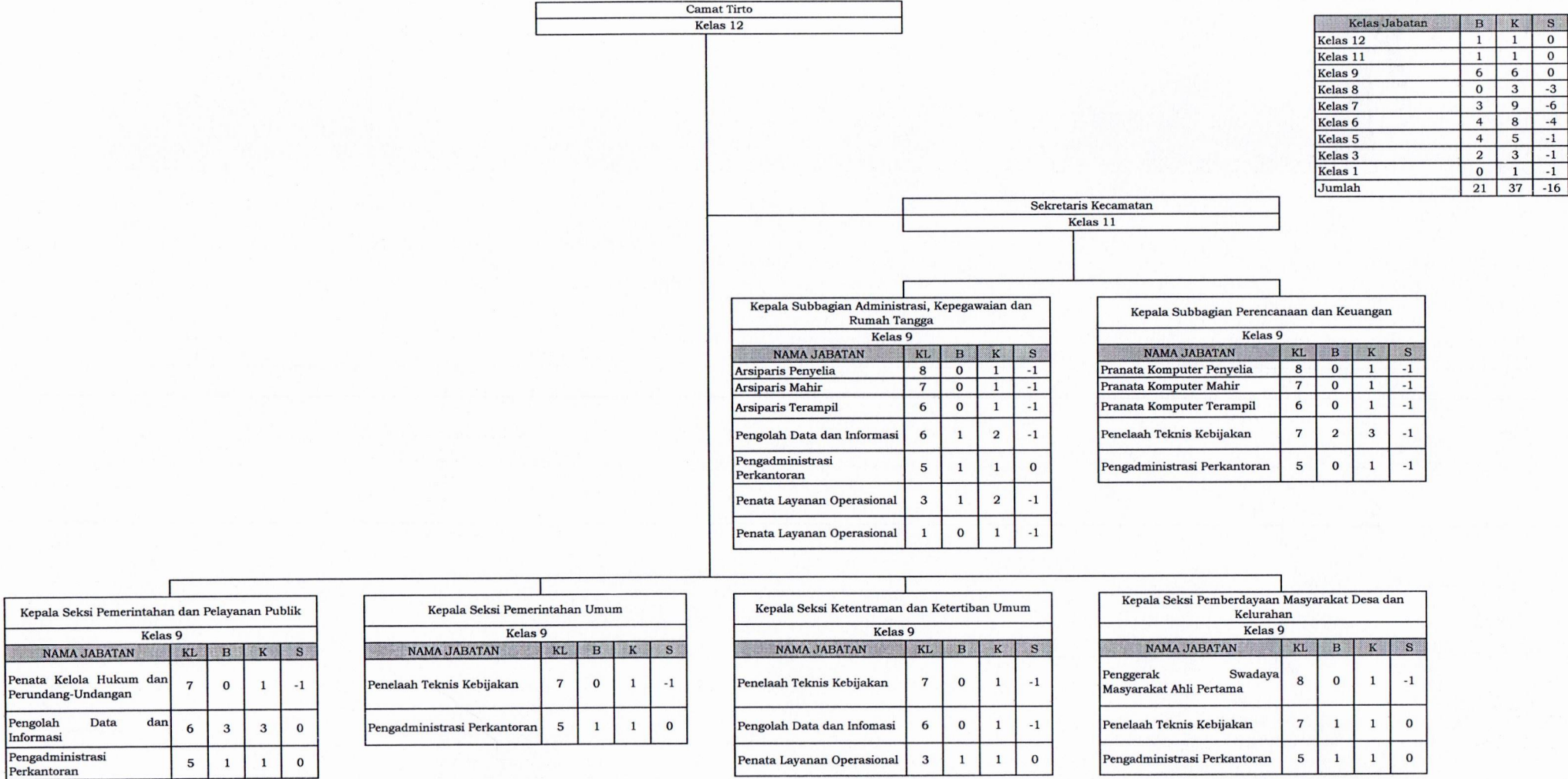
Keterangan :
KL : Kelas Jabatan
B : Jumlah Pegawai yang tersedia
K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja
S : Selisih

PETA JABATAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

XVIII. KECAMATAN SIWALAN



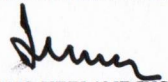
XIX. KECAMATAN TIRTO



BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Keterangan :
KL : Kelas Jabatan
B : Jumlah Pegawai yang tersedia
K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja
S : Selisih

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBA NG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009